

**LAPORAN HASIL AKTUALISASI  
“PENYUSUNAN ANALISIS BERDASARKAN HASIL  
INVENTARISASI TEMA DI BADAN ANGGARAN”**

**PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III SEKRETARIAT  
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI ANGKATAN 2018**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Achmad Yugo Pidhegso, S.E.  
NIP : 199007272018011003  
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Instansi : Pusat Kajian Anggaran**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DPR RI**

**2018**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **LAPORAN HASIL AKTUALISASI**

### **“PENYUSUNAN ANALISIS BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI TEMA DI BADAN ANGGARAN”**

Nama : Achmad Yugo Pidhegso, S.E.  
NIP : 199007272018011003  
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Instansi : Pusat Kajian Anggaran

Cisarua, 2 Oktober 2018

Mengetahui,  
Coach

Bambang Wiyoso, S.T., M.Si.  
NIP.197204112005011001

Menyetujui,  
Mentor

  
Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.  
NIP.198806212014022001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjangkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang mana atas bimbingannya maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar PNS dan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai salah satu prasyarat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Laporan Aktualisasi ini dapat diselesaikan karena tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ir. Indra Iskandar, M.Si., selaku Sekretaris Jenderal DPR RI.
2. Kadir Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum., selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI.
3. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran.
4. Drs. Helmizar, selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
5. Mardi Harjo, S.E., M.Si., selaku Kepala Bagian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
6. Bambang Wiyoso, S.T., M.Si., selaku *coach* PNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
7. Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM., selaku mentor kegiatan Aktualisasi Diklatsar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI.
8. Freesca Syafitri, S.E., selaku Tenaga Ahli Badan Anggaran DPR RI.
9. Tauhid Ahmad, selaku Tenaga Ahli Badan Anggaran DPR RI.
10. Rekan-rekan CPNS Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.

Laporan ini menyajikan dokumentasi atas proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 30 September 2018

Achmad Yugo Pidhegsos, S.E.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran .....	5
B Visi Misi Pusat Kajian Anggaran .....	6
C Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama .....	7
<b>II RANCANGAN AKTUALISASI .....</b>	<b>8</b>
A Deskripsi Isu .....	8
B Pemilihan Isu Prioritas .....	9
C Pemilihan Gagasan Prioritas .....	10
D Matriks Rancangan Aktualisasi .....	11
E Potensi Kendala Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi .....	21
F Rancangan Jadwal Kegiatan Aktualisasi .....	22
<b>III PELAKSANAAN AKTUALISASI .....</b>	<b>23</b>
A Matriks Pelaksanaan Aktualisasi .....	23
B Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi .....	31
<b>IV PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
A Kesimpulan .....	36
B Saran .....	37
C Rencana Tindak Lanjut .....	37
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>

## **BAGIAN I** **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kajian Anggaran**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam menjalankan fungsinya terutama terkait fungsi anggaran, maka dibentuklah Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu unit *supporting system* di bawah Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Kajian Anggaran dahulu merupakan bagian dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang berada di bawah Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan. Seiring dengan perubahan organisasi sistem pendukung dan dikeluarkannya Persekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI maka Pusat Kajian Anggaran resmi dibentuk. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang perancangan APBN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran;
- h. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

## B. Visi Misi Pusat Kajian Anggaran

### Visi

”Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel”

**Pusat Kajian Anggaran yang profesional** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

**Pusat Kajian Anggaran yang andal** mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

**Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel** mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

### Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD sebagai anggota;
- b. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri, secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- c. Menyusun Analisis Ringkas Cepat (ARC), secara individual, sebagai anggota atau ketua tim;
- d. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta ARC.

## **BAGIAN II** **RANCANGAN AKTUALISASI**

### **A. DESKRIPSI ISU**

#### **1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis Pusat Kajian Anggaran Oleh Badan Anggaran DPR RI**

Berdasarkan Pedoman Mutu Pusat Kajian Anggaran, Badan Anggaran merupakan salah satu pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan output kinerja Pusat Kajian Anggaran. Dukungan yang dibutuhkan oleh Badan Anggaran dalam hal ini berupa Analisis/Referensi/ Analisis Ringkas Cepat (ARC) di bidang APBN dan pendampingan Analis APBN di Badan Anggaran untuk mendukung fungsinya dalam siklus pembahasan APBN. Data yang disampaikan oleh Pusat Kajian Anggaran diharapkan tepat waktu, tepat tema, dan akuntabel. Berdasarkan dengan testimoni Analis APBN senior di Pusat Kajian Anggaran bahwa perlu adanya penguatan koordinasi Pusat Kajian Anggaran kepada Alat Kelengkapan Dewan agar output kinerja Pusat Kajian Anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Anggota DPR RI.

Mengingat pentingnya memberi dukungan keahlian dengan tepat secara tema dan waktu ke Badan Anggaran DPR RI, perlu adanya penguatan koordinasi Pusat Kajian Anggaran kepada Badan Anggaran. Pemberian dukungan keahlian oleh Pusat Kajian Anggaran ke Badan Anggaran dilakukan dengan cara mengirimkan hasil kerja berupa Analisis APBN, Referensi, dan Analisis Ringkas Cepat (ARC) kepada Badan Anggaran DPR RI. Penentuan Tema analisis ditentukan secara internal oleh Pusat Kajian Anggaran. Hal ini disinyalir menjadi penyebab dari belum optimalnya pemanfaatan output analisis Pusat Kajian Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk lebih memaksimalkan pemanfaatan output analisis Pusat Kajian Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI, dilakukan penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema analisis APBN di Badan Anggaran DPR RI.

#### **2. Anggota DPR-RI belum *aware* terhadap output kinerja Pusat Kajian Anggaran**

Berangkat dari Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran yang menjadi *supporting system* untuk Anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi Anggaran, peran tersebut dirasa belum maksimal diperkuat dengan testimoni dari Analis APBN senior di Pusat Kajian Anggaran, *Awareness* Anggota DPR RI terhadap output kinerja dari Pusat Kajian Anggaran masih terbilang Rendah. Ketika *awareness* anggota terhadap keberadaan output kinerja Pusat

Kajian Anggaran kurang, maka akan susah untuk Pusat Kajian Anggaran memaksimalkan fungsi sebagai bagian pendukung Anggota DPR dalam fungsi anggaran.

Pembiaran terhadap kecilnya *awareness* Anggota DPR terhadap output kinerja Pusat Kajian Anggaran akan menyebabkan tidak maksimalnya tugas Pusat Kajian Anggaran dalam hal mendukung fungsi anggaran Anggota DPR RI. Hal ini akan berujung pada tidak maksimalnya analisa Anggota DPR dalam menjalankan fungsi anggaran yang merupakan wujud dari tidak maksimalnya nilai Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik.

### **3. Tidak Adanya Data Kontrol Output Kinerja Pusat Kajian Anggaran Yang Digunakan Oleh Anggota DPR RI**

Mengacu pada Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran dimana Pusat Kajian Anggaran berperan sebagai *supporting system* dalam mendukung fungsi Anggaran Anggota DPR RI, Pusat Kajian Anggaran seharusnya memiliki sistem untuk kontrol setiap output kinerja Pusat Kajian Anggaran yang memang dipakai langsung oleh Anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran.

Jika tidak ada sistem kontrol untuk melihat seberapa besar output kinerja Pusat Kajian Anggaran yang memang memenuhi visi dan misi Pusat Kajian Anggaran dalam mendukung fungsi Anggaran Anggota DPR RI. Hal ini akan menyebabkan Pusat Kajian Anggaran tidak mengetahui capaian output yang secara langsung digunakan Anggota DPR RI sebagai indicator tercapainya visi dan misi Pusat Kajian Anggaran. Hal ini merupakan wujud dari tidak maksimalnya nilai Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik.

## **B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS**

**Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG**

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis Pusat Kajian Anggaran Oleh Badan Anggaran DPR RI	5	5	3	13
2	Anggota DPR-RI belum aware terhadap output kinerja Pusat Kajian Anggaran	5	4	3	12
3	Tidak Adanya Data Kontrol Output Kinerja Pusat Kajian Anggaran Yang Digunakan Oleh Anggota DPR RI	2	2	2	6

**U : Urgency, S : Seriousness, G : Growth**

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :

- 1) Isu ke-1 dengan rumusan isu : **Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis Pusat Kajian Anggaran Oleh Badan Anggaran DPR RI**

Gagasan :

- o Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran
- o Pendampingan Analis APBN ke Badan Anggaran
- o Sosialisasi Pusat Kajian Anggaran ke Badan Anggaran

### C. PEMILIHAN GAGASAN PRIORITAS

**Matrik Pemilihan Gagasan Prioritas dengan Analisis USG**

No	Gagasan	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran	5	5	4	14
2	Pendampingan Analis APBN ke Badan Anggaran	4	4	3	11
3	Sosialisasi Pusat Kajian Anggaran ke Badan Anggaran	5	3	3	11

**U : Urgency, S : Seriousness, G : Growth**

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka gagasan yang dipilih adalah :

- 1) Gagasan ke-1 dengan rumusan gagasan : **Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran**

## D. MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

<b>Unit Kerja</b>	<b>: Pusat Kajian Anggaran</b>
<b>Identifikasi Isu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis Pusat Kajian Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI</li> <li>2. Anggota DPR-RI belum <i>aware</i> terhadap output kinerja Pusat Kajian Anggaran</li> <li>3. Tidak Adanya Data Kontrol Output Kinerja Pusat Kajian Anggaran Yang Digunakan Oleh Anggota DPR RI</li> </ol>
<b>Isu yang Diangkat</b>	<b>: Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis Pusat Kajian Anggaran Oleh Badan Anggaran DPR RI</b>
<b>Gagasan Pemecahan Isu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran</li> <li>2. Pendampingan Analis APBN ke Badan Anggaran</li> <li>3. Sosialisasi Pusat Kajian Anggaran ke Badan Anggaran</li> </ol>
<b>Gagasan terpilih adalah Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran</b>	

**Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS**

<b>N o</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Output / Hasil</b>	<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	<b>Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi</b>	<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
1	Perencanaan Kegiatan Inventarisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Persetujuan Melakukan Kegiatan Inventarisasi Tema</li> </ol>	Dalam memulai komunikasi dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari	Dengan melakukan perencanaan kegiatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan	Dengan melakukan perencanaan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan

N o	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2. Izin dan konsultasi dengan mentor 3. Koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran terkait project	Permintaan Badan Anggaran	penerapan <b>Etika Publik</b> . Selain itu Koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran merupakan wujud dari penerapan <b>Whole of Government</b> .	mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran.	Anggaran ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas
2	Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran	1. Izin dan konsultasi dengan mentor 2. Mempelajari jadwal pembahasan setiap siklus APBN 3. Pembuatan dokumen	Pusat Kajian Anggaran memiliki dokumen pendukung analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di badan anggaran yang meliputi: SOP Inventarisasi Tema	Dalam konsultasi dengan mentor akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik</b> . Selain itu dalam tujuan pembuatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran sebagai	Dengan melakukan pembuatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI.	Dengan melakukan pembuatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas dan

<b>N o</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Output / Hasil</b>	<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	<b>Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi</b>	<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		pendukung dalam penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran	Formulir pengisian Tema Analisis, dan lembar evaluasi output analisis.	suatu inovasi ini adalah untuk memaksimalkan pelayanan Pusat Kajian Anggaran sebagai wujud dari penerapan <b>Pelayanan Publik dan Komitmen Mutu</b> .	Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran. Pembuatan SOP baru juga akan berdampak pada perumusan rencana tahunan Pusat Kajian Anggaran.	meningkatkan kualitas output kerja Pusat Kajian Anggaran
3	Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Sesuai SOP yang sudah dirancang	1. Izin dan konsultasi dengan mentor 2. Pemberian formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan	Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran menerima formulir inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan	Dalam konsultasi dengan mentor akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik</b> . Selain itu kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran merupakan	Dengan melakukan kegiatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi	Dengan melakukan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas dan

<b>N o</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tahapan Kegiatan</b>	<b>Output / Hasil</b>	<b>Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan</b>	<b>Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi</b>	<b>Penguatan Nilai Organisasi</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
		Badan Anggaran dan Sosialisasi cara pengisian formulir kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran	Permintaan Badan Anggaran	wujud dari penerapan <b><i>Whole of Government.</i></b>	anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran.	meningkatkan kualitas output kerja Pusat Kajian Anggaran
4	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi	1. Izin dan konsultasi dengan mentor 2. Follow up pengisian formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan	Pusat Kajian Anggaran menerima data kebutuhan Analisa anggaran dan pengawasan dari Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga	Dalam konsultasi dengan mentor akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik.</b> Selain itu kerjasama dengan Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran merupakan	Dengan melakukan monitoring kegiatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung	Dengan melakukan monitoring inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai

N o	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Permintaan Badan Anggaran 3. Penarikan kembali formulir inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dari Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran	Ahli Badan Anggaran.	wujud dari penerapan <b><i>Whole of Government.</i></b>	fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran	Profesionalitas dan meningkatkan kualitas output kerja Pusat Kajian Anggaran

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi	1. Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor 2. Laporan data hasil inventarisasi kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor 3. Pemilihan tema Analisis APBN berdasarkan hasil inventarisasi 4. Penyusunan Analisis	Terdapat Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi	Dalam komunikasi dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik</b> . Analisis berdasarkan hasil inventarisasi merupakan wujud dari penerapan <b>Pelayanan Publik</b> dimana output tersebut dimaksutkan untuk melayani Badan Anggaran sebagai user secara maksimal.	Dengan melakukan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Serta menjadi wujud dari visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran	Dengan melakukan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas dan meningkatkan kualitas output kerja Pusat Kajian Anggaran.

N o	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6	Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran	<p>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</p> <p>2. Pemberian Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran</p>	Badan Anggaran mendapatkan Analisis berdasarkan permintaan	<p>Dalam komunikasi dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik</b>.</p> <p>Koordinasi dengan Tenaga Ahli serta secretariat Badan Anggaran ini merupakan wujud dari penerapan <b>Whole of Government</b>.</p> <p>Memiliki output analisis yang sesuai dengan permintaan user merupakan wujud dari suatu pelayanan yang responsive merupakan wujud dari penerapan nilai <b>Pelayanan Publik</b>.</p>	<p>Dengan melakukan Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI.</p> <p>Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran</p>	<p>Dengan melakukan Distribusi Analisis Cepat Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas dan meningkatkan kualitas output kerja Pusat Kajian Anggaran.</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Analisis	<p>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</p> <p>2. Pemberian lembar Evaluasi Output Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran</p>	<p>Pusat Kajian Anggaran mendapatkan evaluasi terkait dengan analisis yang telah disusun kepada Badan Anggaran.</p>	<p>Dalam komunikasi dengan Mentor akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik</b>. Koordinasi dengan Tenaga Ahli serta secretariat Badan Anggaran ini merupakan wujud dari penerapan <b>Whole of Government</b>. Memberikan lembar evaluasi kepada konsumen merupakan wujud dari pelayan public yang peduli terhadap kemauan konsumen yang merupakan wujud dari nilai <b>Pelayanan Publik</b>. Evaluasi merupakan bentuk dari komitmen untuk selalu</p>	<p>Dengan melakukan Evaluasi penyusunan analisis ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Serta menjadi wujud dari visi Pusat Kajian Anggaran yang professional. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran</p>	<p>Dengan melakukan Distribusi Analisis Cepat Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas dan meningkatkan kualitas output kerja Pusat Kajian Anggaran.</p>

N o	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				menaikkan mutu pelayanan yang merupakan wujud dari <b>Komitmen Mutu</b>		
8.	Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran	1. Izin dan konsultasi dengan mentor 2. Evaluasi hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran 3. Pembuatan Laporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil	Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran menerima laporan hasil kegiatan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran	Dalam komunikasi dengan Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran akan dilakukan dengan hormat dan Bahasa yang sopan sebagai wujud dari penerapan <b>Etika Publik</b> . Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui kualitas kegiatan yang telah dilakukan yang akan dilanjutkan dengan merumuskan saran perbaikan yang merupakan wujud dari penerapan <b>Komitmen Mutu</b> . Pembuatan Laporan	Dengan melakukan pelaporan kegiatan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran. Serta	Dengan melakukan pelaporan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai Profesionalitas dan Akuntabilitas.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Inventarisasi Tema di Badan Anggaran Anggaran 4. Pelaporan hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran		kegiatan merupakan suatu wujud dari penerapan nilai <b>Akuntabilitas.</b>	menjadi wujud dari visi Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel.	

## **E. POTENSI KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI**

Dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Kebutuhan Analisa Anggaran di Badan Anggaran, terdapat potensi hambatan sebagai berikut:

1. Komunikasi antara Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran dengan Analis APBN sebagai pelaku kegiatan belum terjalin dengan baik;
2. Potensi mispersepsi Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran terhadap substansi kegiatan;
3. Pengaturan waktu antara time schedule kegiatan dengan kewajiban yang tertera pada SKP.

## F. RANCANGAN JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Perencanaan kegiatan inventarisasi																				
2.	Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran																				
3.	Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Sesuai SOP yang telah dirancang																				
4.	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi																				
5.	Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi																				
6.	Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota / Tenaga Ahli Badan Anggaran																				
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Analisis																				
8.	Pembuatan Laporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran																				

Keterangan:

- Libur Hari Raya
- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

### BAGIAN III PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

<b>Unit Kerja</b>	:	Pusat Kajian Anggaran
<b>Identifikasi Isu</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis Pusat Kajian Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI</li> <li>2. Anggota DPR RI belum <i>aware</i> terhadap output kinerja Pusat Kajian Anggaran</li> <li>3. Tidak Adanya Data Kontrol Output Kinerja Pusat Kajian Anggaran yang Digunakan oleh Anggota DPR RI</li> </ol>
<b>Isu yang Diangkat</b>	:	Belum Optimalnya Pemanfaatan Output Analisis pusat Kajian Anggaran oleh Badan Anggaran DPR RI
<b>Gagasan Pemecahan Isu</b>	:	Penyusunan Analisis Berdasarkan hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran

Kegiatan 1	Perencanaan Kegiatan Inventarisasi
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran</li> <li>2. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>3. Koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran terkait project</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar konsultasi mentor (terlampir)</li> <li>2. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (telampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	30 Mei – 6 Juni 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada melaksanakan izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk melaksanakan kegiatan, penulis memiliki hambatan yaitu tidak mengetahui perihal format Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan yang menjadi bukti fisik persetujuan Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk penulis melakukan kegiatan project perubahan.</li> <li>2. Pada tahapan ini penulis mengalami kendala pada saat akan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran terkait dengan project dikarenakan jadwal Kepala Bagian Sekretariat Anggaran yang padat pada saat pembahasan siklus APBN. Dikhawatirkan dengan padatnya jadwal Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran, akan membuat pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal.</li> </ol>
Solusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis bersama dengan rekan-rekan CPNS Analis APBN Ahli Pertama melakukan koordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk meminta format Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan.</li> <li>2. Dalam mengatasi kendala pada saat akan melakukan koordinasi, penulis ditemani dengan mentor menunggu dan langsung datang ke Kepala Bagian Sekretariat Badan dan meminta untuk meluangkan waktu sebentar untuk melakukan koordinasi dan pengenalan awal dengan penulis dan project yang akan dilaksanakan, maka kegiatan 1 dapat dilaksanakan tepat waktu.</li> </ol>

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran ini adalah sejatinya merupakan kegiatan meminta izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk penulis melakukan kegiatan project perubahan di Pusat Kajian Anggaran. Pada hari Rabu, 30 Mei 2018 penulis meminta contoh Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan (SKMK) kepada Staf Penyusun Bahan Kebijakan PKA untuk kemudian membuat SKMK kegiatan aktualisasi. Kemudian penulis menyampaikan SKMK tersebut dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk kemudian diperiksa dan ditanda tangani. Kepala Pusat Kajian Anggaran menyetujui dan menandatangani SKMK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan project perubahan ini. (<b>Etika Publik &amp; Nasionalisme</b>). Adanya SKMK dalam melakukan kegiatan merupakan dasar untuk membuat pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan ini merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Setelah Kepala Pusat Kajian Anggaran menyetujui pelaksanaan kegiatan, penulis lalu melakukan konsultasi kepada mentor untuk melaporkan persetujuan pelaksanaan kegiatan dan melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan berikutnya. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>. Konsultasi dengan mentor dilakukan dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (<b>Etika Publik &amp; Nasionalisme</b>)</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran Pada hari Rabu, 6 Juni 2018 penulis melakukan koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran dalam hal ini adalah Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran Ibu Dra. Nurul Faiziah. Kegiatan ini sejatinya adalah kegiatan menjelaskan kegiatan aktualisasi dan meminta persetujuan untuk melakukan kegiatan aktualisasi yang berkaitan dengan Badan Anggaran. Dalam hal ini, Sekretariat Badan Anggaran diwakili oleh Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran menyetujui adanya kegiatan aktualisasi yang melibatkan Badan Anggaran. Koordinasi yang baik dengan Sekretariat Badan Anggaran merupakan wujud dari internalisasi dari nilai <b>Whole of Government</b>. Penyampaian penjelasan dan koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran disampaikan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (<b>Etika Publik &amp; Nasionalisme</b>)</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan perencanaan kegiatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam Visi dan Misi Pusat Kajian Anggaran yaitu <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel</b> .

Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan perencanaan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional dan Akuntabel.</b>
----------------------------	---

<b>Kegiatan 2</b>		<b>Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran</b>
Tahapan Kegiatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Mempelajari jadwal pembahasan setiap siklus APBN</li> <li>3. Pembuatan dokumen pendukung dalam penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> </ol>
Output		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir)</li> <li>2. Rancangan SOP (terlampir)</li> <li>3. Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran (terlampir)</li> <li>4. Lembar Evaluasi Analisis (terlampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan		7 Juni – 15 Agustus 2018
Hambatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan kedua ini memiliki hambatan yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal membuat SOP dan kurangnya pengetahuan penulis tentang ISO. Hal tersebut membuat pelaksanaan kegiatan ini melebihi waktu yang diperkirakan.</li> <li>2. Padatnya tugas pokok jabatan mengakibatkan proses pembelajaran terkait pembuatan SOP dan formulir inventarisasi tersendat dan memakan waktu lebih banyak dari yang diperkirakan.</li> </ol>
Solusi		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam mengatasi hambatan pengetahuan dan pengalaman terkait pembuatan SOP dan ISO, penulis belajar dengan bimbingan dari mentor yang pada akhirnya penulis dapat merumuskan rancangan SOP yang sesuai dengan standard yang berlaku.</li> <li>2. Pengerjaan kegiatan dilakukan di setiap sela-sela kegiatan pada tugas pokok penulis yang membuat kegiatan ini dapat diselesaikan walaupun memakan waktu yang lebih lama dari perkiraan</li> </ol>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan		<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Pada tanggal 7 Juni 2018, tepat setelah selesainya kegiatan 1 dilaksanakan, penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana pelaksanaan kegiatan 2 beserta serba serbi yang harus disiapkan untuk pelaksanaan kegiatan 2. Pada prakteknya, tahapan kegiatan 1 ini dilakukan lebih dari 1 kali mengingat pengetahuan dan pengalaman penulis dalam merumuskan SOP masih sangat minim. Pada pelaksanaan tahapan kegiatan ini, penulis diberikan contoh perumusan SOP oleh mentor. Pada saat melakukan konsultasi, penulis melakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang merupakan wujud dari internalisasi nilai Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Dengan <b>kemauan belajar yang tinggi dan kemauan untuk terus memperkaya kemampuan penulis</b>, maka hal tersebut merupakan contoh dari internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Pada saat melakukan konsultasi dengan mentor, penulis memberikan formulir konsultasi</p>

	<p>mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Pada tahapan selanjutnya, penulis melakukan pembelajaran jadwal pembahasan setiap siklus APBN. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis mempelajari <i>timeline</i> dari pembahasan APBN di Badan Anggaran dan dibantu oleh mentor. Pada saat melakukan diskusi dengan mentor terkait siklus APBN, penulis melakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang merupakan wujud dari internalisasi nilai Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Dengan kemauan belajar yang tinggi dan kemauan untuk terus memperkaya <b>kemampuan penulis</b>, maka hal tersebut merupakan contoh dari internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Dalam melakukan pembelajaran pembahasan setiap siklus APBN, penulis juga bertanya kepada rekan-rekan senior serta Sekretariat Badan Anggaran yang merupakan internalisasi dari nilai <b>Whole of Government</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Tahapan berikutnya adalah penulis membuat Rancangan SOP Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran, Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran, dan Formulir Evaluasi Analisis. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini, penulis berangkat dari pengetahuan dan pembelajaran pada tahapan 1 dan 2 disertai dengan bimbingan dari mentor. Setiap proses penulis laporan kepada mentor, jika terdapat revisi maka penulis langsung memperbaiki dan mengirimkan kembali ke mentor untuk diperiksa hingga tidak ada revisi. Setelah tidak ada revisi dari mentor, penulis ditemani bersama mentor pada hari Rabu, 15 Agustus 2018 penulis meminta persetujuan Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran. Lalu seluruh dokumen pendukung disetujui oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran. Pada saat melakukan konsultasi dengan mentor dan melakukan permintaan izin ke Kepala Pusat Kajian Anggaran, penulis melakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar yang merupakan wujud dari internalisasi nilai Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Adanya SOP baru merupakan suatu bukti bahwa terdapat <b>inovasi</b> yang merupakan internalisasi dari nilai <b>Komitmen Mutu</b>.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan pembuatan format inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran. Pembuatan SOP baru juga akan berdampak pada perumusan rencana tahunan Pusat Kajian Anggaran. Inovasi dalam kegiatan ini merupakan penguatan tujuan Pusat Kajian Anggaran yaitu mewujudkan <b>Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, Handal, dan Akuntabel</b> .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan pembuatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional</b> dan <b>Akuntabel</b> .

<b>Kegiatan 3</b>	<b>Pelaksanaan kegiatan inventarisasi sesuai SOP yang sudah dirancang</b>
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Pemberian formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dan Sosialisasi cara pengisian formulir kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota / Tenaga Ahli Badan Anggaran.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir)</li> <li>2. <i>Screenshot</i> email pengiriman formulir inventarisasi (terlampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	21 Agustus 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padatnya agenda dan kegiatan Badan Anggaran menjadi kendala yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan ini. Penulis menemukan kesulitan dalam menentukan jadwal dan menemui pihak Badan Anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pemberian Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran.</li> </ol>
Solusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis mendapatkan kontak Tenaga Ahli dari mentor, lalu pada tanggal 21 Agustus 2018 penulis melakukan perkenalan dan menjelaskan perihal project yang sedang penulis lakukan via <i>whatsapp</i>. Pihak tenaga ahli yang dihubungi penulis bersedia untuk mengisi formulir inventarisasi tema analisis di Badan Anggaran.</li> </ol>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan. Konsultasi dengan mentor juga membahas tentang tata cara untuk menghubungi pihak Badan Anggaran untuk mengisi formulir inventarisasi tema analisis di Badan Anggaran. Konsultasi dengan mentor dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Pada tahapan kegiatan ini penulis menghubungi Tenaga Ahli Badan Anggaran via <i>whatsapp</i> dikarenakan padatnya jadwal Badan Anggaran dalam pembahasan RAPBN 2019 dan Tenaga Ahli sedang melakukan kunjungan ke daerah. Penulis melakukan perkenalan dan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang akan penulis lakukan terkait dengan project perubahan. Tenaga Ahli Badan Anggaran yang dihubungi penulis bersedia untuk mengisi formulir inventarisasi tema analisis di Badan Anggaran. Setelah itu penulis mengirimkan formulir inventarisasi via <i>e-mail</i> kepada Tenaga Ahli Badan Anggaran. Kegiatan perkenalan dan penjelasan kepada Tenaga Ahli Badan Anggaran dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan wujud dari internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Melakukan koordinasi <b>dengan baik</b> antara penulis dan Tenaga Ahli Badan Anggaran merupakan wujud dari nilai <b>Whole of Government</b></p>

Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan kegiatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran. Melaksanakan inventarisasi tema analisis di Badan Anggaran akan membuat penentuan tema analisis lebih tepat guna dalam mendukung kinerja Badan Anggaran merupakan wujud dari tujuan <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel.</b>
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional dan Akuntabel.</b>

<b>Kegiatan 4</b>	<b>Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi</b>
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. <i>Follow up</i> pengisian Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran</li> <li>3. Penarikan kembali Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dari Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota / tenaga Ahli Badan Anggaran.</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir);</li> <li>2. <i>Screenshot</i> percakapan penulis dan Tenaga Ahli via <i>whatsapp</i> (terlampir);</li> <li>3. Lembar Formulir Inventarisasi yang telah diisi (terlampir);</li> <li>4. Dokumentasi (terlampir).</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	23 - 31 Agustus 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padatnya agenda dan kegiatan Badan Anggaran menjadi kendala yang signifikan pada pelaksanaan kegiatan ini. Penulis menemukan kesulitan dalam menentukan jadwal dan menemui pihak Badan Anggaran untuk melaksanakan tahapan kegiatan Penarikan kembali Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran.</li> </ol>
Solusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli yang bersangkutan via <i>whatsapp</i> untuk menentukan waktu yang tepat untuk menemui Tenaga Ahli yang bersangkutan guna menarik kembali Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran yang telah diisi.</li> </ol>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1 –</b> Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan. Konsultasi dengan mentor juga membahas tentang padatnya jadwal kegiatan Badan Anggaran yang mungkin dapat menyebabkan sulitnya penarikan kembali Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran. Konsultasi dengan mentor dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna</p>

	<p>menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Setelah melakukan konsultasi dengan mentor, penulis melakukan <i>Follow up</i> pengisian Formulir Inventarisasi Tema Analisis di Badan Anggaran. Tahapan kegiatan ini dilakukan melalui <i>whatsapp</i> pada tanggal 23 Agustus 2018, tetapi Tenaga Ahli Badan Anggaran sedang berada di Sumatera Utara dan belum bisa untuk mengisi formulir terkait. Lalu pada tanggal 28 Agustus 2018, penulis dan Tenaga Ahli Badan Anggaran berjanji untuk bertemu di Ruang Sidang Badan Anggaran tetapi pesawat yang ditumpangi oleh Tenaga Ahli Badan Anggaran yang bersangkutan mengalami keterlambatan yang menyebabkan Tenaga Ahli Badan Anggaran tidak dapat bertemu pada hari yang telah disepakati. Lalu penulis dan Tenaga Ahli Badan Anggaran bersepakat untuk bertemu pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan formulir yang telah diisi. Koordinasi via <i>whatsapp</i> dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Koordinasi yang baik dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran merupakan wujud dari nilai <b>Whole of Government</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Pada hari Jumat, 31 Agustus 2018 penulis dan Tenaga Ahli Badan Anggaran bertemu di Ruang Sidang Badan Anggaran. Dalam pertemuan tersebut penulis dan Tenaga Ahli Badan Anggaran melakukan diskusi terkait tema analisis yang diperlukan oleh Badan Anggaran. Diskusi dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Dalam diskusi tersebut, penulis <b>mendapatkan banyak pengetahuan dan dapat meningkatkan mutu output</b> dari penulis, merupakan internalisasi dari <b>Komitmen Mutu</b>. Dalam pengisian dan diskusi terkait tema analisis di Badan Anggaran, penulis dan Tenaga Ahli <b>mementingkan kepentingan negara bukan kepentingan individu, golongan ataupun partai politik tertentu</b>, merupakan internalisasi dari nilai <b>Nasionalisme</b>. Pemilihan dan penentuan tema analisis di Badan Anggaran dilakukan dengan <b>transparan tanpa adanya paksaan atau kepentingan dari golongan tertentu</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Anti Korupsi</b>.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan monitoring kegiatan inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel</b> .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan monitoring inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional</b> dan <b>Akuntabel</b> .

Kegiatan 5	Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor</li> <li>2. Laporan data hasil inventarisasi kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor</li> <li>3. Pemilihan tema Analisis APBN berdasarkan hasil inventarisasi</li> <li>4. Penyusunan Analisis</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir)</li> <li>2. Analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran (terlampir)</li> <li>3. Dokumentasi (terlampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	3 – 14 September 2018
Hambatan	1. Minimnya pengalaman penulis dalam membuat analisis menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Solusi	1. Bimbingan dari mentor dan kemauan penulis untuk membaca dan mempelajari contoh-contoh analisis yang telah disusun oleh Pusat Kajian Anggaran menjadi hal yang menunjang kemampuan penulis menyelesaikan penyusunan analisis.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1 - 3</b> – Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan. Dalam konsultasi tersebut juga langsung dilakukan pemilihan tema analisis sesuai dengan hasil inventarisasi. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>. Pemilihan tema analisis berdasarkan hasil inventarisasi merupakan wujud dari internalisasi dari nilai <b>Akuntabilitas</b> karena <b>pemilihan didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 4</b> – Setelah ditentukan tema analisis, penulis mulai menyusun analisis pada tanggal 3 September 2018. Dalam tahapan penyusunan analisis penulis selalu berdiskusi dengan mentor dan mendapatkan pengetahuan baru serta beberapa revisi yang langsung diterapkan oleh penulis. Diskusi dengan mentor terkait substansi analisis dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Setelah analisis sudah tersusun, penulis melakukan presentasi didepan PNS Analis APBN dan Pegawai Tidak Tetap Analis APBN Pusat Kajian Anggaran di Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran pada hari Rabu, 12 September 2018. Dalam presentasi tersebut penulis mendapatkan beberapa masukan untuk menambah kualitas analisis. Diskusi dalam presentasi tersebut <b>juga menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menulis analisis</b> merupakan</p>

	wujud dari nilai <b>Komitmen Mutu</b> . Lalu pada tanggal 13 September 2018, penulis sudah selesai menyusun analisis disertai dengan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil diskusi pada saat presentasi analisis di Pusat Kajian Anggaran. Penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan hasil <i>output</i> sesuai dengan permintaan pelanggan merupakan internalisasi dari nilai <b>Pelayanan Publik</b> .
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Serta menjadi wujud dari visi <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel</b> .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional, Akuntabel, dan Integritas</b> .

<b>Kegiatan 6</b>	<b>Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota / Tenaga Ahli Badan Anggaran</b>
Tahapan Kegiatan	1. Izin dan konsultasi dengan mentor 2. Pemberian Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota / Tenaga Ahli Badan Anggaran
Output	1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir) 2. <i>Screenshot</i> email pengiriman Analisis (terlampir)
Tanggal Pelaksanaan	14 September 2018
Hambatan	1. Padatnya kegiatan Tenaga Ahli Badan Anggaran menjadi hambatan dalam pemberian analisis dikarenakan Tenaga Ahli Badan Anggaran tidak dapat ditemui dan sedang diluar kota.
Solusi	1. Penulis mengirimkan Analisis APBN melalui <i>e-mail</i> kepada Tenaga Ahli Badan Anggaran.
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan. Konsultasi dengan mentor juga membahas tentang hasil akhir analisis untuk diperiksa kembali oleh mentor lalu disetujui oleh mentor untuk dikirimkan ke Tenaga Ahli Badan Anggaran. Konsultasi dengan mentor dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Setelah mendapatkan persetujuan dari mentor, penulis mengirimkan analisis ke Tenaga Ahli Badan Anggaran via <i>e-mail</i> dikarenakan Tenaga Ahli Badan Anggaran sedang berada diluar kota. Koordinasi yang baik</p>

	dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran merupakan wujud dari nilai <b><i>Whole of Government</i></b> . Memberikan Analisis yang telah diperbaiki dan selalu memikirkan kepuasan customer dalam mengirimkan analisis tepat waktu merupakan penerapan dari nilai <b>Pelayanan Publik</b> . Penyampaian <i>e-mail</i> ditulis dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan wujud dari internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b> .
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel</b> .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan Distribusi Analisis Cepat Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional dan Akuntabel</b> .

Kegiatan 7	Evaluasi Hasil Penyusunan Analisis
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Pemberian lembar evaluasi Output Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota / Tenaga Ahli Badan Anggaran</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir)</li> <li>2. Screenshot pengiriman lembar evaluasi output analisis (terlampir)</li> <li>3. Lembar evaluasi output analisis yang sudah diisi (terlampir)</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	19 - 26 September 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padatnya kegiatan Tenaga Ahli Badan Anggaran menjadi hambatan dalam pemberian dan penyerahan kembali formulir evaluasi analisis dikarenakan Tenaga Ahli Badan Anggaran tidak dapat ditemui dan sedang diluar kota.</li> </ol>
Solusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis dan Tenaga Ahli Badan Anggaran melakukan koordinasi via <i>e-mail</i>.</li> </ol>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<p><b>Tahapan kegiatan 1</b> – Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan. Konsultasi dengan mentor juga membahas tentang keadaan bahwa Tenaga Ahli yang bersangkutan tidak dapat bertemu dengan penulis dikarenakan sedang berada diluar kota. Konsultasi dengan mentor dilakukan dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Pada tanggal 19 September 2018 penulis menghubungi Tenaga Ahli Badan Anggaran bahwa akan ada evaluasi hasil analisis dilakukan</p>

	dengan pengisian formulir evaluasi hasil analisis. Dikarenakan Tenaga Ahli yang bersangkutan tidak berada dikantor, maka penulis mengirimkan formulir evaluasi melalui <i>e-mail</i> . Pada tanggal 26 September 2018 Tenaga Ahli Badan Anggaran mengirimkan formulir evaluasi yang telah diisi melalui <i>e-mail</i> dikarenakan Tenaga Ahli yang bersangkutan tidak berada dikantor. Koordinasi dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran dilakukan dengan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b> . Koordinasi yang baik dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran merupakan wujud dari nilai <b>Whole of Government</b> . Formulir evaluasi berisi kritik dan saran dari customer yang merupakan masukan yang membangun untuk <b>terus meningkatkan mutu output</b> dan <b>terus mementingkan kepuasan pelanggan</b> merupakan internalisasi dari nilai <b>Komitmen Mutu dan Pelayanan Publik</b> .
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan Evaluasi penyusunan analisis ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Serta menjadi wujud dari visi <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel</b> .
Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan Distribusi Analisis Cepat Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Tenaga Ahli Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional dan Akuntabel</b> .

<b>Kegiatan 8</b>	<b>Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran</b>
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Evaluasi hasil penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> <li>3. Pembuatan Laporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran</li> <li>4. Pelaporan hasil penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> </ol>
Output	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Konsultasi Mentor (terlampir)</li> <li>2. Hasil Evaluasi dari PNS dan PTT Pusat Kajian Anggaran (terlampir)</li> <li>3. Laporan Hasil Kegiatan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran.</li> </ol>
Tanggal Pelaksanaan	26 – 30 September 2018
Hambatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Padatnya kegiatan tugas pokok jabatan menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan ini.</li> </ol>
Solusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penulis mengerjakan kegiatan ini di sela-sela padatnya kegiatan tugas pokok agar kegiatan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.</li> </ol>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<b>Tahapan kegiatan 1</b> – Kegiatan diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor bahwa kegiatan ini siap untuk dilaksanakan. Konsultasi dengan mentor

	<p>juga membahas tentang hasil evaluasi yang telah diberikan oleh Tenaga Ahli Badan Anggaran dan juga formulir evaluasi project oleh Pusat Kajian Anggaran. Konsultasi dengan mentor dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Pada saat konsultasi mentor, penulis mendapatkan masukan yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan diri penulis, merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>. Penulis memberikan formulir konsultasi mentor guna menjadi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan kegiatan merupakan internalisasi nilai <b>Akuntabilitas</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 2</b> – Kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 September 2018 dengan membuat formulir evaluasi project Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran untuk diisi oleh PNS dan PTT di Pusat Kajian Anggaran. Penulis membuat konsep formulir lalu meminta persetujuan mentor. Setelah melalui revisi, formulir yang telah disetujui lalu disebarluaskan melalui <i>whatsapp</i> yang nantinya akan diisi oleh PNS dan PTT di Pusat Kajian Anggaran. Formulir evaluasi telah diisi oleh 20 orang responden dengan memuat testimoni, kritik, dan saran terhadap project yang telah dilaksanakan. Diskusi dengan mentor dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> merupakan internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>. Kegiatan evaluasi project yang dilaksanakan dan berkaca dari kritik dan saran yang diberikan oleh Pusat Kajian Anggaran sebagai <i>stakeholder</i> dari project ini <b>menambah pengetahuan dan kemampuan penulis yang akan memperbaiki output yang dikerjakan penulis</b> di masa yang akan datang merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 3</b> – Pembuatan laporan dilakukan mulai pada tanggal 26 September 2018. Pada pembuatan laporan ini penulis mengirimkan konsep kepada mentor dan <i>coach</i> untuk diperiksa dan diberikan saran perbaikan yang langsung diterapkan oleh penulis. Komunikasi dengan mentor dan <i>coach</i> dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> sebagai internalisasi nilai <b>Etika Publik, Nasionalisme, dan Whole of Government</b>. Perbaikan yang dilakukan dalam pembuatan laporan ini merupakan internalisasi nilai <b>Komitmen Mutu</b>.</p> <p><b>Tahapan kegiatan 4</b> – Pelaporan hasil project ini dilakukan pada terusan Latihan Dasar CPNS di Griya Sabha Wisma DPR RI di Cikopo. Dihadiri oleh mentor, <i>coach</i>, dan penguji. Penyampaian laporan dilakukan <b>dengan sopan, beretika, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar</b> sebagai internalisasi nilai <b>Etika Publik dan Nasionalisme</b>.</p>
Kontribusi terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Dengan melakukan pelaporan kegiatan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran ini maka akan mendukung visi dan misi Pusat Kajian Anggaran yaitu sebagai pendukung fungsi anggaran DPR RI. Disamping itu, kegiatan ini akan berkontribusi dalam fungsi Pusat Kajian Anggaran yaitu Pelaksanaan dukungan Kajian Anggaran. Serta menjadi wujud dari visi <b>Pusat Kajian Anggaran yang Handal, Profesional, dan Akuntabel</b> .

Penguatan Nilai Organisasi	Dengan melakukan pelaporan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran ini maka akan menguatkan nilai <b>Profesional dan Akuntabilitas.</b>
----------------------------	--

## B. Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No.	Kegiatan/tahapan kegiatan	Mei		Juni		Juli		Agustus		September		
		W5	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2
<b>1. Perencanaan Kegiatan Inventarisasi</b>												
1.1 Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran												
1.2 Izin dan konsultasi dengan mentor												
1.3 Koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran terkait project												
<b>2 Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran</b>												
2.1 Izin dan konsultasi dengan mentor												
2.2 Mempelajari jadwal pembahasan setiap siklus APBN												
2.3 Pembuatan dokumen pendukung dalam penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran												
<b>3 Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Sesuai SOP yang sudah dirancang</b>												
3.1 Izin dan konsultasi dengan mentor												
3.2 Pemberian formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dan Sosialisasi cara pengisian formulir kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran												
<b>4 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi</b>												
4.1 Izin dan konsultasi dengan mentor												
4.2 Follow up pengisian formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran												
4.3 Penarikan kembali formulir inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dari Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran												
<b>5 Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi</b>												
5.1 Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor												
5.2 Laporan data hasil inventarisasi kepada Kepala Pusat Pusat Kajian Anggaran dan mentor												
5.3 Pemilihan tema Analisis APBN berdasarkan hasil inventarisasi												
5.4 Penyusunan Analisis												
<b>6 Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran</b>												
6.1 Izin dan konsultasi dengan mentor												
6.2 Pemberian Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran												
<b>7 Evaluasi hasil penyusunan Analisis</b>												
7.1 Izin dan konsultasi dengan mentor												
7.2 Pemberian lembar Evaluasi Output Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran												
<b>8 Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran</b>												
8.1 Izin dan konsultasi dengan mentor												
8.2 Evaluasi hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran												
8.3 Pembuatan Laporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran												
8.4 Pelaporan hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran												

■ Pelaksanaan Aktual

■ Libur Lebaran

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang tertera pada rancangan awal, kegiatan tersebut adalah:

- 1. Pembuatan SOP dan Formuir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran**
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Sesuai SOP yang sudah dirancang**
- 3. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi**
- 4. Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi**
- 5. Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran**
- 6. Evaluasi hasil penyusunan analisis**
- 7. Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran**

Perubahan jadwal disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan “Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran” mengalami keterlambatan penyelesaian selama 5 Minggu dari rencana awal. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis dalam pembuatan SOP sesuai dengan ISO. Waktu tersebut digunakan penulis untuk belajar dan menyusun SOP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAGIAN IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Atas pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, maka telah diaktualisasikan pula nilai-nilai dasar PNS serta pengetahuan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Delapan kegiatan yang telah diaktualisasikan di tempat kerja selama rentang waktu 30 Mei sampai dengan 30 September 2018 yaitu:

1. Perencanaan Kegiatan Inventarisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan *Whole of Government*.
2. Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan *Whole of Government*.
3. Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Sesuai SOP yang sudah dirancang dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan *Whole of Government*.
4. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, *Whole of Government*, dan Anti Korupsi.
5. Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan Pelayanan Publik.
6. Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik.
7. Evaluasi hasil penyusunan analisis dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik.
8. Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran dengan nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah Etika Publik, Nasionalisme, Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan *Whole of Government*.

Pembelajaran yang didapat dari kegiatan aktualisasi dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta mengetahui peran dan kedudukan PNS dalam NKRI adalah mewujudkan nilai

nilai akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan, mengedepankan semangat nasionalisme diatas kepentingan pribadi maupun golongan, menerapkan standar etika publik dalam perilaku kerja dan keseharian, senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan, dan tidak melakukan praktik korupsi di lingkungan kerja.

Jika dalam melaksanakan kedelapan kegiatan di atas tanpa didasari nilai-nilai dasar PNS dan pengetahuan tentang kedudukan PNS dalam NKRI maka hasil pekerjaan akan kurang optimal sehingga menyebabkan tujuan organisasi juga tidak tercapai secara optimal.

#### **B. Saran**

Selama proses pembelajaran klasikal maupun non klasikal dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi ini, maka terdapat beberapa saran dimana penulis berharap melalui kegiatan dan laporan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan sehingga tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS. Penyusunan analisis yang berdasarkan inventarisasi dapat meningkatkan akurasi pemilihan tema dan waktu pemberian analisis Pusat Kajian Anggaran untuk mendukung fungsi pengawasan. Untuk kedepannya diharapkan Pusat Kajian Anggaran lebih menuju ke kebutuhan Anggota daripada Tenaga Ahli atau Sekretariat agar tema yang di-inventarisasi benar-benar langsung oleh anggota tanpa ada perantara Tenaga Ahli ataupun Sekretariat. Selain itu, untuk selanjutnya diharapkan project ini bisa diterapkan untuk Alat Kelengkapan Dewan lainnya yang menjadi *counterpart* dari Pusat Kajian Anggaran.

#### **C. Rencana Tindak Lanjut**

Agar kegiatan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan serta tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS maka penulis akan:

1. Saya akan melaksanakan kegiatan penyusunan analisis atau kajian berdasarkan permintaan Anggota atau Tenaga Ahli pada unit kerja dimana saya ditempatkan saat ini yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
2. Saya akan memonitor apakah analisis atau kajian yang saya buat dikutip ataupun menjadi dasar pembahasan dalam rapat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai salah satu kontrol *output*.
3. Terus melakukan pembelajaran guna meningkatkan kualitas output analisis atau kajian yang disusun oleh penulis.

# **LAMPIRAN KEGIATAN 1**

*Perencanaan Kegiatan Inventarisasi*

## BUKTI PENGENDALIAN PEMBELAJARAN AKTUALISASI OLEH MENTOR

Nama Peserta	:	ACHMAD YUGO PIDHEGSO
NIP	:	199007272018011003
Unit Kerja	:	PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Jabatan	:	CALON ANALIS APBN AHLI PERTAMA
Isu	:	PENYUSUNAN ANALISIS BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI TEMA DI BADAN ANGGARAN

### 1) Kegiatan 1 : Perencanaan Kegiatan Inventarisasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	1. Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 2. Izin dan konsultasi dengan mentor 3. Koordinasi dengan Sekretariat Badan Anggaran terkait project	Tahapan kegiatan sudah sesuai dan dapat dilaksanakan .  <i>ok</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	1. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan;	Ok  <i>ok</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	1. Etika Publik; 2. Whole of Government.	Ok  <i>ok</i>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li><li>Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li></ul>	Ok  <i>ok</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Profesionalitas</li><li>Meningkatkan kualitas output PKA</li></ul>	Ok  <i>ok</i>

### Catatan Tambahan:

Pada penyusunan perencanaan kegiatan terdapat btrp kali revisi terutama pasca presentasi di kopo. Akalnya kegiatan hanya berupa inventarisasi , tetapi dari hasil masukan penggi , kegiatan ini berkembang hingga penulisan analisis .

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
(021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN  
NOMOR: BK/ /SETJEN DPR RI/PA/ /2018**

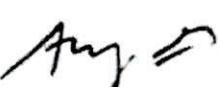
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Achmad Yugo Pidhegs, S.E.  
NIP 199007272018011003  
Jabatan Calon Analis APBN Ahli Pertama  
Unit Kerja Pusat Kajian Anggaran DPR RI

Adalah benar CPNS Golongan III Setjen dan BK DPR RI yang melaksanakan kegiatan aktualisasi mulai tanggal 28 Mei 2018 – 30 September 2018 Adapun kegiatan aktualisasi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Jakarta, 30 Mei 2018  
Kepala Pusat Kajian Anggaran,

  
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE., M.Si

NIP. 19710911 199703 1 005

## **LAMPIRAN KEGIATAN 2**

*Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran*

**2) Kegiatan 2 : Pembuatan SOP dan Formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran**

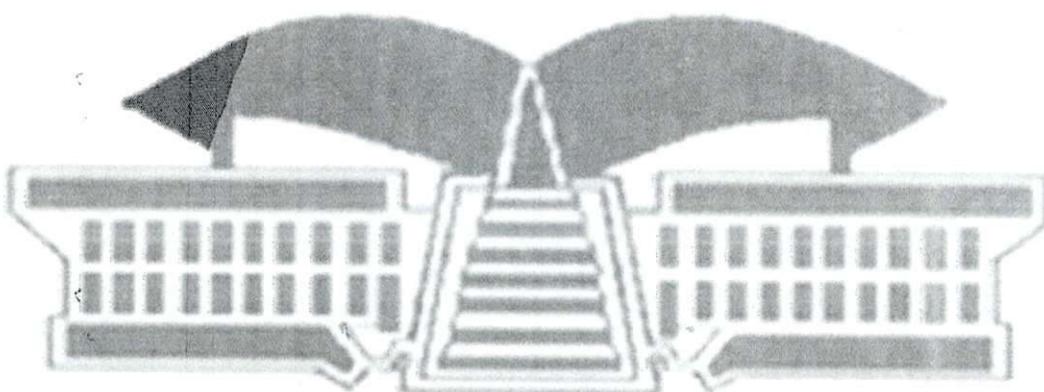
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Mempelajari jadwal pembahasan setiap siklus APBN</li> <li>3. Pembuatan dokumen pendukung dalam penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> </ol>	<i>Sudah ok, tapi gk ada implementasikan perlu memperhatikan jadwal di banggar yg cukup dinamis &amp; berubah - ubah.</i> <i>SPK</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Inventarisasi Tema di Badan Anggaran</li> <li>2. Formulir Pengisian Tema Analisis</li> <li>3. Lembar Evaluasi Output Analisis</li> </ol>	<i>SOP perlu disesuaikan dengan SOP penyusunan Analisis yg sudah dibuat PKA</i> <i>SPK</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Publik;</li> <li>2. Pelayanan Publik</li> <li>3. Komitmen Mutu</li> </ol>	<i>ok</i> <i>SPK</i>
Kontribusi terhadap Tujuan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	<i>ok</i> <i>SPK</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	<i>ok</i> <i>SPK</i>

**Catatan Tambahan:**

Formulir pengisian tema analisis perlu berisi : jenis output analisis, Siklus, tema analisis, judul analisis, waktu penyelesaian. Kedepannya juga perlu ditanyakan jumlah halaman yg dlinginkan.

Suryi ✓  
15/8/2020

# PROSEDUR INVENTARISASI TEMA ANALISIS APBN



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Prosedur Operasional
Judul :	Pengisian Tema Analisis oleh Badan Anggaran

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Daftar Isi .....	2
1. Tujuan .....	2
2. Ruang Lingkup .....	2
3. Acuan .....	2
4. Definisi .....	2
5. Tanggung Jawab .....	3
6. Uraian Prosedur .....	3
7. Rekaman .....	5
8. Kriteria Keberhasilan .....	5

No Dok :	Tanggal : -- xxxxxx 2018
Revisi : 00	Hal: 1 s/d 5



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Prosedur Operasional
Judul :	Pengisian Tema Analisis oleh Badan Anggaran

## **1. TUJUAN**

Prosedur ini sebagai panduan dalam kegiatan inventarisasi tema analisis APBN sebagai sumber tema untuk pembuatan Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

## **2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini di mulai dari penentuan jadwal inventarisasi tema Analisis APBN, pendokumentasian hasil inventarisasi tema analisis APBN, penyusunan Analisis APBN berdasarkan hasil inventarisasi tema Analisis APBN, sampai distribusi Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

## **3. ACUAN**

- 3.1. Undang – Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- 3.2. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- 3.3. Permenpan No. 39 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional analis APBN.
- 3.4. Program Kerja Pusat Kajian Anggaran.

## **4. DEFINISI**

- 4.1. RI : Republik Indonesia
- 4.2. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 4.3. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
- 4.4. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
- 4.5. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 4.6. TKDD : Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
- 4.7. Banggar : Badan Anggaran
- 4.8. Kasubag : Kepala Sub Bagian

No Dok :	Tanggal : -- xxxxxx 2018
Revisi : 00	Hal: 2 s/d 5



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Prosedur Operasional
Judul :	Pengisian Tema Analisis oleh Badan Anggaran

- 4.9. TU : Tata Usaha
- 4.10. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4.11. Renstra : Rencana Strategis
- 4.12. SKP : Sistem Kinerja Pegawai
- 4.13. Tim Koordinasi Analisis adalah Tim yang ditunjuk untuk mengkoordinir kegiatan penyusunan Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

## **5. TANGGUNG JAWAB**

- 5.1. Kepala Pusat;
- 5.2. Koordinator Bidang;
- 5.3. Kasubag TU;
- 5.4. Analis;

## **6. URAIAN PROSEDUR**

- 6.1. Tim Koordinasi Analisis melakukan rapat penentuan jadwal inventarisasi tema analisis APBN oleh Badan Anggaran, dengan membuat surat undangan dan dibuktikan dengan daftar hadir ;
- 6.2. Tim Koordinasi Analisis meminta persetujuan Kepala Pusat terhadap jadwal inventarisasi tema analisis APBN berdasarkan hasil rapat;
- 6.3. Analis APBN menyampaikan jadwal inventarisasi tema analisis APBN kepada Sekretariat Banggar;
- 6.4. Analis APBN melakukan diskusi Tema Analisis APBN dan inventarisasi tema analisis APBN dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran / Tenaga Ahli Anggota Badan Anggaran / Anggota Badan Anggaran dilakukan dengan wawancara, yang dibuktikan dengan pengisian formulir inventarisasi tema Analisis APBN;

No Dok :	Tanggal : -- xxxxx 2018
Revisi : 00	Hal: 3 s/d 5



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Prosedur Operasional
Judul :	Pengisian Tema Analisis oleh Badan Anggaran

- 6.5. Hasil inventarisasi Tema Analisis APBN disampaikan kepada Kasub TU untuk didokumentasikan kedalam database;
- 6.6. Analis APBN menyusun Analisis APBN sesuai tema yang diajukan Badan Anggaran dan sesuai dengan Prosedur Penyusunan Analisis yang telah ditentukan;
- 6.7. Analis APBN mempresentasikan draft Analisis APBN didepan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan/atau para Analis Pusat Kajian Anggaran;
- 6.8. Analis APBN melakukan revisi hasil presentasi draft Analisis APBN paling lama 1 (satu) minggu setelah presentasi;
- 6.9. Koordinator Bidang melakukan koreksi terhadap penyempurnaan draft analisis;
- 6.10. Jika sudah tidak ada koreksi, Koordinator Bidang memberikan paraf dan/atau memberikan persetujuan melalui email atas penyempurnaan draft analisis kemudian diserahkan kepada Tim Koordinasi Analisis untuk diteruskan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran;
- 6.11. Kepala Pusat Kajian Anggaran melakukan koreksi terhadap penyempurnaan draft analisis;
- 6.12. Jika sudah tidak ada koreksi, Kepala Pusat Kajian Anggaran memberikan paraf dan/atau memerlukan persetujuan melalui email atas draft analisis yang sudah disempurnakan;
- 6.13. Analis APBN dan/atau Tim Koordinasi Analisis menyampaikan analisis final ke TU dalam bentuk *soft file*;
- 6.14. Pelaksana TU melakukan proses pencetakan Analisis melalui pihak ketiga;
- 6.15. Analis APBN menyampaikan hasil Analisis APBN kepada Anggota Badan Anggaran / Tenaga Ahli Badan Anggaran / Tenaga Ahli Anggota Badan Anggaran / Sekretariat Badan Anggaran yang memberikan tema analisis;

No Dok :	Tanggal : -- xxxxxx 2018
Revisi : 00	Hal: 4 s/d 5



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Jenis Dokumen :	Prosedur Operasional
Judul :	Pengisian Tema Analisis oleh Badan Anggaran

- 6.16. Distribusi Analisis APBN dilakukan oleh TU dengan arahan Analis APBN untuk disampaikan pada rapat pembahasan siklus APBN, diutamakan pada saat rapat panitia kerja yang sesuai dengan tema analisis.

## **7. REKAMAN**

- 7.1. Surat Undangan Penentuan Jadwal Inventarisasi;
- 7.2. Daftar Hadir Diskusi Penentuan Jadwal Inventarisasi;
- 7.3. Laporan Singkat Diskusi Penentuan Jadwal Inventarisasi;
- 7.4. Formulir Inventarisasi Tema;
- 7.5. Surat Undangan Presentasi Analisis;
- 7.6. Daftar Hadir Presentasi Analisis;
- 7.7. Laporan Singkat Presentasi Analisis;
- 7.8. Cetakan Analisis.

## **8. KRITERIA KEBERHASILAN**

- 8.1. Tema Analisis APBN yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi tema analisis.

No Dok :	Tanggal : -- xxxxxxx 2018
Revisi : 00	Hal: 5 s/d 5





## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

### FORMULIR INVENTARISASI TEMA ANALISIS APBN

- Tujuan Pembuatan Form** : 1. Meningkatkan pelayanan kepada Badan Anggaran DPR RI  
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi produk Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan kebutuhan Badan Anggaran DPR RI  
3. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI
- Panduan Pengisian Form** : 1. Formulir terdiri atas 6 bagian yaitu Jenis Output, Siklus, Nama, Posisi/Jabatan, Pengisian Isu per Tema APBN, dan Catatan  
2. Pada bagian Jenis Output diisi format output yang diharapkan. Terdapat 2 jenis, yaitu:  
    a. **Analisis** : Tulisan dengan jumlah halaman maksimal 12 hal. mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara umum.  
    b. **Referensi** : Tulisan dengan jumlah halaman maksimal 15 hal. yang memaparkan data-data mengenai suatu topik tertentu.  
3. Pada Bagian Siklus diisi dengan keterkaitan tema Analisis APBN dengan siklus APBN yang diinginkan. Terdapat 6 pilihan yaitu PP RAPBN, APBN Perubahan, Lapsem APBN, APBN Induk, LKPP, dan Lainnya.  
4. Pada Bagian Nama diisi dengan nama pengisi formulir.  
5. Pada Bagian Posisi/Jabatan diisi dengan Posisi/Jabatan pengisi formulir.  
6. Pada bagian pengisian isu per tema APBN terdapat 3 kolom, yaitu:  
    a. **Tema APBN**, diisi dengan memberikan tanda check (✓) pada tema APBN yang dipilih.  
    b. **Isu**, diisi dengan menuliskan Isu terkait dengan Tema APBN yang dipilih pada kolom sebelumnya. Terdapat batasan pengisian isu yaitu **Maksimal 2 (dua)** isu setiap Tema APBN.  
    c. **Waktu Penyelesaian yang Diharapkan**, diisi dengan waktu yang diinginkan pengisi formulir kepada Pusat Kajian Anggaran untuk menyelesaikan Analisis/Referensi yang telah dipilih.  
7. Pada bagian Catatan diisi jika terdapat tambahan catatan tertentu terkait dengan Tema APBN atau Isu yang telah dipilih.

**Contact Person** : Achmad Yugo Pidhegs (081288878753)



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

FORMULIR PENGISIAN TEMA

Jenis Output :  Analisis  Referensi

Siklus :  PP RAPBN  APBN Perubahan  Lapsem APBN  
 APBN Induk  LKPP  Lainnya

Nama : *[Handwritten signature]*

Posisi/Jabatan :  Anggota DPR RI  
 Tenaga Ahli  
 Sekretariat Badan Anggaran

Tema APBN	Isu	Waktu Penyelesaian yang Diharapkan
<input type="checkbox"/> Asumsi Dasar Ekonomi Makro		
<input type="checkbox"/> Pendapatan Negara		
<input type="checkbox"/> Belanja Pemerintah Pusat		
<input type="checkbox"/> Transfer ke Daerah dan Dana Desa		
<input type="checkbox"/> Pembiayaan		
<input type="checkbox"/> Lainnya		

Catatan :

Jakarta, .....

TERIMA KASIH



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

**EVALUASI HASIL ANALISIS**

Judul Analisis : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

Posisi/Jabatan :  
 Anggota DPR RI  
 Tenaga Ahli  
 Sekretariat Badan Anggaran

Evaluasi : \_\_\_\_\_

1. Bagaimana kesesuaian tema analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?

---

---

---

2. Bagaimana kesesuaian waktu pemberian analisis / referensi ?

---

---

---

3. Bagaimana kesesuaian substansi analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?

---

---

---

4. Bagaimana kesesuaian jumlah halaman dan tampilan visual analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?

---

---

---

5. Berikan saran agar penulisan analisis / referensi memenuhi kebutuhan Badan Anggaran.

---

---

---

---

---

**TERIMA KASIH**

## **LAMPIRAN KEGIATAN 3**

*Pelaksanaan Kegiataan Inventarisasi Sesuai SOP  
yang sudah dirancang*

3) Kegiatan 3 : Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Sesuai SOP yang sudah dirancang

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Pemberian formulir Inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Permintaan Badan Anggaran dan Sosialisasi cara pengisian formulir kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran</li> </ol>	<p>Pemberian formulir analisis sebaiknya diberikan secara langsung dan dilakukan dengan metode awaswara</p> <p>Ok</p>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/ Tenaga Ahli Badan Anggaran menerima formulir Inventarisasi</li> </ol>	<p>Anggota &amp; diutamakan baru sekretariat &amp; TA</p> <p>Ok</p>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Publik;</li> <li>2. <i>Whole of Government</i></li> </ol>	<p>Ok</p> <p>Ok</p>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	<p>Ok</p> <p>Ok</p>
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	<p>Ok</p> <p>Ok</p>

**Catatan Tambahan:**

Dalam memberikan formulir Inventarisasi, sebaiknya memperhatikan juga jadwal rapat di banggar agar ada waktu yg cukup panjang dalam proses pengisian formulir hingga penulisan analisis. Tahapan ini juga perlu mempertimbangkan jadwal anggota & TA yg cukup padat.

## Koordinasi dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran via Whatsapp



## Pengiriman formulir inventarisasi ke Tenaga Ahli Badan Anggaran via e-mail

Formulir Inventarisasi Tema Analisis APBN Badan Anggaran

Achmad Yugo Pidhegs [aachmadyugo@gmail.com](mailto:aachmadyugo@gmail.com)  
to [fyafitri@freesca.id](mailto:fyafitri@freesca.id), [fyafitri@pttivit.id](#)

Kepada Yth,  
Ibu Frisya  
Tenaga Ahli Badan Anggaran DPR RI

Tue, Aug 21, 10:41 AM

Dengan Hormat,  
Terlampir documen Formulir Inventarisasi Tema Analisis APBN Badan Anggaran.  
Mohon untuk dicetak lalu disi berdasarkan kebutuhan tema analisis APBN di Badan Anggaran.

Atas kerjasamanya saya ucapan terima kasih.

Hormat Saya,

Achmad Yugo Pidhegs



Freesca Syafitri   
to me, [fyafitri@pttivit.id](#)

Tue, Aug 21, 9:58 PM

Indonesian English Translate message

Turn off for Indonesian

Assalamualaikum Mas Yugo,

Terlampir adalah soft copy utk formulir inventarisnya ya. Semoga membantu ya.  
btw, saya baru dinfo last minute hari ini dari kementerian perempuan kl besok harus ikut seminar mpe tgl 31 di Kuningan. bagusnya gimana ya utk hard copy nya ?  
Mohon maaf sekali lg ga dtempat.  
Terimakasih banyak ya.

Best,

Freesca



## **LAMPIRAN KEGIATAN 4**

*Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi*

#### 4) Kegiatan 4 : Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan mentor</li> <li>2. Follow up pengisian formulir inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Perminataan Badan Anggaran</li> <li>3. Penarikan kembali formulir inventarisasi Tema Analisis Berdasarkan Perminataan Badan Anggaran</li> </ol>	ok <i>Sekali</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKA menerima data kebutuhan Analisis dari Badan Anggaran</li> </ol>	ok <i>Sekali</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Publik;</li> <li>2. <i>Whole of Government</i></li> </ol>	ok <i>Sekali</i>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	ok <i>Sekali</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	ok <i>Sekali</i>

**Catatan Tambahan:**

Penarikan formulir sebaiknya dilakukan dengan bertemu langsung, namun jika tidak memungkinkan bisa melalui e-mail.



## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

### FORMULIR INVENTARISASI TEMA ANALISIS APBN

#### Tujuan Pembuatan Form

- : 1. Meningkatkan pelayanan kepada Badan Anggaran DPR RI
- 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi produk Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan kebutuhan Badan Anggaran DPR RI
- 3. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI

#### Panduan Pengisian Form

- : 1. Formulir terdiri atas 6 bagian yaitu Jenis Output, Siklus, Nama, Posisi/Jabatan, Pengisian Isu per Tema APBN, dan Catatan
- 2. Pada bagian Jenis Output diisi format output yang diharapkan. Terdapat 2 jenis, yaitu:
  - a. **Analisis** : Tulisan dengan jumlah halaman maksimal 12 hal. mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara umum.
  - b. **Referensi** : Tulisan dengan jumlah halaman maksimal 15 hal. yang memaparkan data-data mengenai suatu topik tertentu.
- 3. Pada Bagian Siklus diisi dengan keterkaitan tema Analisis APBN dengan siklus APBN yang diinginkan. Terdapat 6 pilihan yaitu PP RAPBN, APBN Perubahan, Lapse APBN, APBN Induk, LKPP, dan Lainnya.
- 4. Pada Bagian Nama diisi dengan nama pengisi formulir.
- 5. Pada Bagian Posisi/Jabatan diisi dengan Posisi/Jabatan pengisi formulir.
- 6. Pada bagian pengisian isu per tema APBN terdapat 3 kolom, yaitu:
  - a. **Tema APBN**, diisi dengan memberikan tanda check (✓) pada tema APBN yang dipilih.
  - b. **Isu**, diisi dengan menuliskan Isu terkait dengan Tema APBN yang dipilih pada kolom sebelumnya. Terdapat batasan pengisian isu yaitu **Maksimal 2 (dua)** isu setiap Tema APBN.
  - c. **Waktu Penyelesaian yang Diharapkan**, diisi dengan waktu yang diinginkan pengisi formulir kepada Pusat Kajian Anggaran untuk menyelesaikan Analisis/Referensi yang telah dipilih.
- 7. Pada bagian Catatan diisi jika terdapat tambahan catatan tertentu terkait dengan Tema APBN atau Isu yang telah dipilih.

#### Contact Person

: Achmad Yugo Pidhegso (081288878753)



PUSAT KAJIAN ANGGRARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

FORMULIR PENGISIAN TEMA

Jenis Output :  Analisis  Referensi

Siklus :  PP RAPBN  APBN Perubahan  Lapsem APBN  
 APBN Induk  LKPP  Lainnya

Nama : Freesca Syafitri

Posisi/Jabatan :  Anggota DPR RI  
 Tenaga Ahli  
 Sekretariat Badan Anggaran

Tema APBN	Isu	Waktu Penyelesaian yang Diharapkan
<input type="checkbox"/> Asumsi Dasar Ekonomi Makro		
<input type="checkbox"/> Pendapatan Negara		
<input type="checkbox"/> Belanja Pemerintah Pusat		
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Dana Daerah Mengalami Kemiskinan Perdebatan ?	2 Minggu
<input type="checkbox"/> Pembiayaan		
<input type="checkbox"/> Lainnya		

Catatan :

Jakarta, ..... 31 Agustus 2018

fuu

TERIMA KASIH



## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

### FORMULIR INVENTARISASI TEMA ANALISIS APBN

#### Tujuan Pembuatan Form

- : 1. Meningkatkan pelayanan kepada Badan Anggaran DPR RI
- 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi produk Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dengan kebutuhan Badan Anggaran DPR RI
- 3. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI

#### Panduan Pengisian Form

- : 1. Formulir terdiri atas 6 bagian yaitu Jenis Output, Siklus, Nama, Posisi/Jabatan, Pengisian Isu per Tema APBN, dan Catatan
- 2. Pada bagian Jenis Output diisi format output yang diharapkan. Terdapat 2 jenis, yaitu:
  - a. **Analisis** : Tulisan dengan jumlah halaman maksimal 12 hal. mengenai suatu tema tertentu yang dibahas secara umum.
  - b. **Referensi** : Tulisan dengan jumlah halaman maksimal 15 hal. yang memaparkan data-data mengenai suatu topik tertentu.
- 3. Pada Bagian Siklus diisi dengan keterkaitan tema Analisis APBN dengan siklus APBN yang diinginkan. Terdapat 6 pilihan yaitu PP RAPBN, APBN Perubahan, Lapsem APBN, APBN Induk, LKPP, dan Lainnya.
- 4. Pada Bagian Nama diisi dengan nama pengisi formulir.
- 5. Pada Bagian Posisi/Jabatan diisi dengan Posisi/Jabatan pengisi formulir.
- 6. Pada bagian pengisian isu per tema APBN terdapat 3 kolom, yaitu:
  - a. **Tema APBN**, diisi dengan memberikan tanda check (✓) pada tema APBN yang dipilih.
  - b. **Isu**, diisi dengan menuliskan Isu terkait dengan Tema APBN yang dipilih pada kolom sebelumnya. Terdapat batasan pengisian isu yaitu **Maksimal 2 (dua)** isu setiap Tema APBN.
  - c. **Waktu Penyelesaian yang Diharapkan**, diisi dengan waktu yang diinginkan pengisi formulir kepada Pusat Kajian Anggaran untuk menyelesaikan Analisis/Referensi yang telah dipilih.
- 7. Pada bagian Catatan diisi jika terdapat tambahan catatan tertentu terkait dengan Tema APBN atau Isu yang telah dipilih.

#### Contact Person

: Achmad Yugo Pidhegso (081288878753)



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

FORMULIR PENGISIAN TEMA

Jenis Output :  Analisis  Referensi

Siklus :  PP RAPBN  APBN Perubahan  Lapsem APBN  
 APBN Induk  LKPP  Lainnya

Nama : Tatihid

Posisi/Jabatan  Anggota DPR RI  
 Tenaga Ahli  
 Sekretariat Badan Anggaran

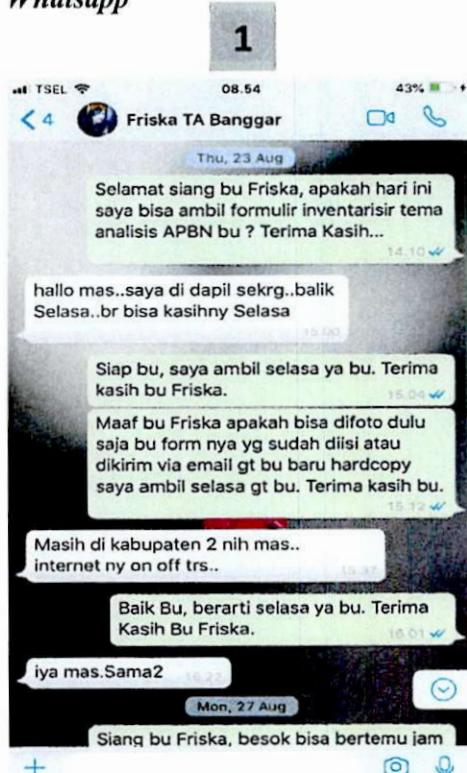
Tema APBN	Isu	Waktu Penyelesaian yang Diharapkan
<input type="checkbox"/> Asumsi Dasar Ekonomi Makro		
<input type="checkbox"/> Pendapatan Negara		
<input type="checkbox"/> Belanja Pemerintah Pusat		
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer ke Daerah dan Dana Desa	TKDD (Data Fisik)	2 minggu ✓
<input type="checkbox"/> Pembiayaan		
<input type="checkbox"/> Lainnya		

Catatan :

Jakarta, .....  
31 Agustus 2018

TERIMA KASIH

**Follow up pengisian formulir inventarisasi dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran via Whatsapp**



**Dokumentasi diskusi dan penarikan formulir inventarisasi tema analisis di Badan Anggaran**



# **LAMPIRAN KEGIATAN 5**

*Penyusunan Analisis*

**5) Kegiatan 5 : Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor</li> <li>2. Laporan data hasil Inventarisasi kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor</li> <li>3. Pemilihan tema analisis berdasarkan hasil inventarisasi</li> <li>4. Penyusunan Analisis</li> </ol>	<p>Tahapan sudah sesuai, tetapi sebagai bentuk quality control thd p hasil analisis perlu dilakukan presentasi di depan kapus/ analis APBN lainnya u/ mendapatkan masukan</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	1. PKA memiliki Analisis berdasarkan inventarisasi tema di Badan Anggaran	Ok
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Publik;</li> <li>2. Pelayanan Publik</li> </ol>	Ok
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	Ok
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	Ok

**Catatan Tambahan:**

## Analisis Capaian Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Indonesia

Achmad Yugo Pidhegsos\*)

### I. Anggaran Dana Desa Meningkat Sebesar 352 Persen dari Tahun 2015 ke RAPBN 2019

NAWACITA Jokowi – Jusuf Kalla yang Ketiga berbunyi “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan. Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan dalam setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Terdapat 2 prioritas penggunaan Dana Desa yaitu untuk program pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Salah satu tujuan Dana Desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah Mengentaskan Kemiskinan. Dengan adanya anggaran Dana Desa ini diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan khususnya pada masyarakat perdesaan. Berikut adalah besaran anggaran Dana Desa dari tahun 2014 sampai RAPBN tahun 2019 :

**Gambar 1. Anggaran Dana Desa 2014 – 2019 (dalam Rupiah)**



*Sumber : Nota Keuangan APBN 2019, Kementerian Keuangan 2018*

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. [achmadyugo@gmail.com](mailto:achmadyugo@gmail.com)

Gambar 1 menunjukkan bahwa anggaran Dana Desa naik drastis dari tahun pertama yaitu tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun menjadi Rp73 triliun pada Nota Keuangan APBN 2019 atau naik 352%. Hal ini seharusnya diikuti dengan percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pada masyarakat perdesaan.

Pada Tabel 1 bisa dilihat bahwa dari pada tahun 2015 dan tahun 2016, penggunaan Dana Desa lebih fokus pada proyek pembangunan dengan porsi lebih dari 80% di setiap tahunnya. Untuk proyek pemberdayaan masyarakat hanya mendapatkan porsi dibawah 10% dan secara pergerakan setiap tahunnya proporsi penggunaan Dana Desa untuk proyek pemberdayaan masyarakat berkurang dari 7,7% di tahun 2015 menjadi hanya 6,8% dari total Dana Desa tahun 2016.

**Tabel 1. Penyaluran Dana Desa Lebih Fokus Pada Proyek Pembangunan**

Penyaluran Dana Desa	2015		2016	
Pembangunan	Rp14,21 T	82,21%	Rp50,54 T	87,70%
Pemberdayaan Masyarakat	Rp1,37 T	7,70%	Rp3,17 T	6,80%
Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp1,13 T	6,55%	Rp1,68 T	3,60%
Pembinaan Kemasyarakatan	Rp0,61 T	3,51%	Rp0,84 T	1,80%
<b>JUMLAH DANA DESA</b>	<b>Rp20,77 T</b>		<b>Rp46,98 T</b>	

Sumber : Buku Pintar Dana Desa, Kementerian Keuangan 2018

## II. Kemiskinan Menurun Tetapi Ketimpangan Meningkat di Perdesaan

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan perdesaan dari 14,17% pada tahun 2014 sebelum adanya Dana Desa menjadi 13,20% pada tahun 2018. Penurunan angka kemiskinan pedesaan ini terjadi dengan catatan yaitu terjadi kenaikan dalam Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada masyarakat perdesaan. Hal ini harus juga menjadi perhatian bagi pemerintah untuk selalu mengawasi penggunaan Dana Desa agar tidak hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi juga mempersempit kesenjangan pengeluaran masyarakat desa dan memperkecil jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

**Tabel 2. Kemiskinan Perdesaan dan Gini Rasio Indonesia 2014 - 2018**

NO	KEMISKINAN PERDESAAN	TAHUN					Selisih 2014 - 2018
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Persentase Penduduk Miskin	14,17 %	14,21 %	14,11 %	13,93 %	13,20 %	-0,97%
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,26	2,55	2,74	2,49	2,37	0,11
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,57	0,71	0,79	0,67	0,63	0,06
4	Gini Rasio	0,319	0,334	0,327	0,320	0,324	0,005

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

Dalam hal mengatasi ketimpangan pendapatan secara keseluruhan, adanya Dana Desa belum bisa menjadi solusi. Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 2 Gini Rasio pada tahun 2014 lebih rendah 0,005 daripada tahun 2018. Tren Anggaran Dana Desa yang selalu bertambah seharusnya diikuti dengan pengawasan dan perencanaan penggunaan Dana Desa yang baik agar tercapai *outcome* yang diinginkan.

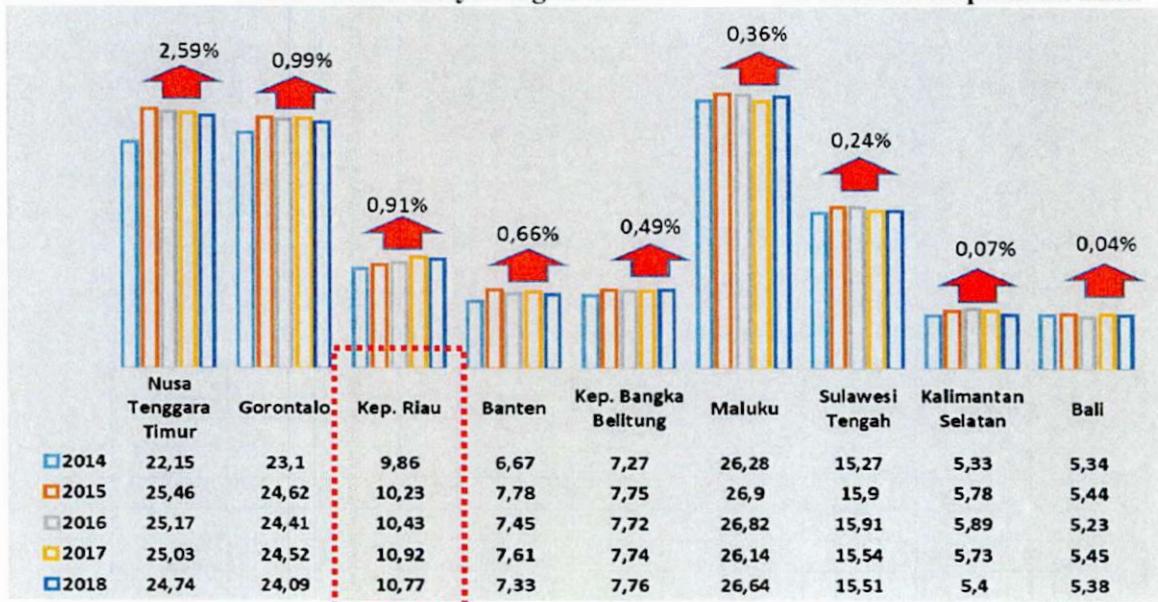
Dana Desa dengan proyek padat karya cash sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas. Pemerintah perlu memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program padat karya cash khususnya fokus pada sasaran program padat karya cash yaitu Pengangguran dan Penduduk Miskin. Jangan sampai proyek yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan hanya dinikmati oleh pemborong tertentu yang akhirnya tidak tepat sasaran.

Kehadiran pendamping desa yang profesional juga sangat diperlukan dalam usaha untuk optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 12 menyebutkan salah satu tugas pendamping desa adalah mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada tahun 2017 Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT menyebutkan bahwa terdapat kekurangan pendamping desa yaitu dengan jumlah kurang lebih 70.000 desa di Indonesia hanya terdapat 34.000 pendamping desa. Pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pendamping desa dan juga penggunaan pendamping desa untuk kegiatan yang bersifat perencanaan strategis bukan hanya administratif.

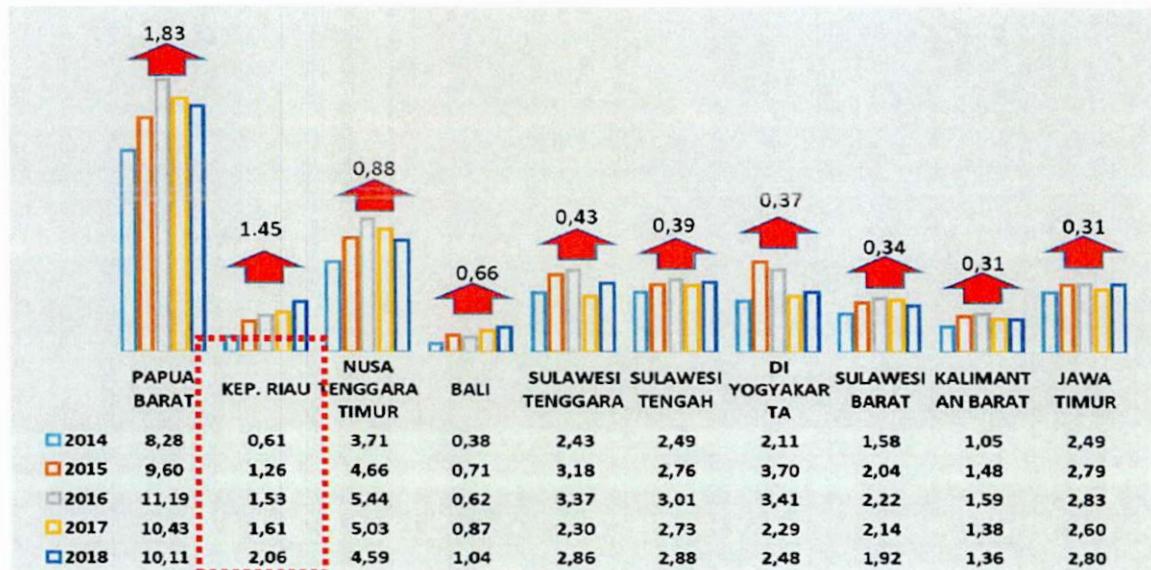
Penyimpangan penggunaan Dana Desa juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya salah satu tujuan Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan perdesaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai tahun 2015 hingga 2017 terdapat 154 kasus penyelewengan Dana Desa. ICW juga menyebutkan bahwa dalam kasus penyelewengan Dana Desa tersebut terdapat 12 modus yang salah satunya adalah membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari Dana Desa. Hal ini patut diberikan perhatian khusus oleh Satgas Dana Desa dan juga aparat penegak hukum agar Dana Desa dapat dengan tepat disalurkan sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

### **III. Provinsi dengan Tingkat Pertumbuhan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Terendah 2014 – 2018**

Gambar 2 – Gambar 5 merupakan data yang menunjukkan 10 provinsi yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal pengentasan kemiskinan dan ketimpangan terutama sejak diberlakukan Dana Desa. Pada data tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki pergerakan bertolak belakang dengan salah satu tujuan Dana Desa yaitu mengentaskan kemiskinan, data menunjukkan bahwa pada provinsi-provinsi tertentu kemiskinan dan ketimpangan malah semakin memburuk seiring dengan adanya Dana Desa.

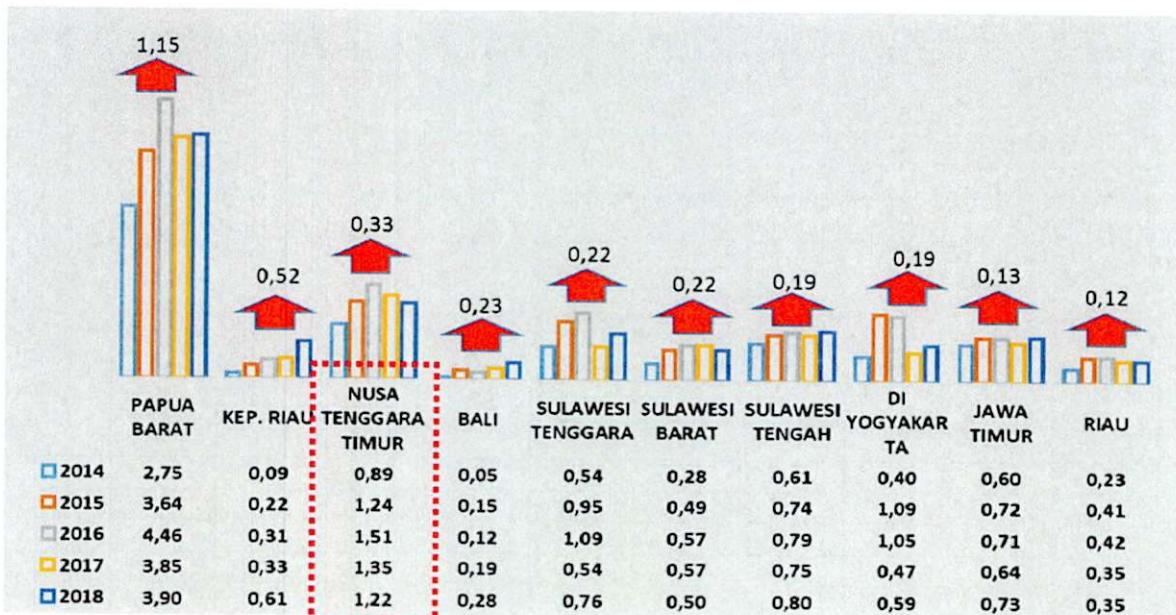
**Gambar 2. Tren Memburuknya Angka Kemiskinan Pada Provinsi Kepulauan Riau**

Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

**Gambar 3. Tren Memburuknya Indeks Kedalaman Kemiskinan Pada Provinsi Kepulauan Riau**

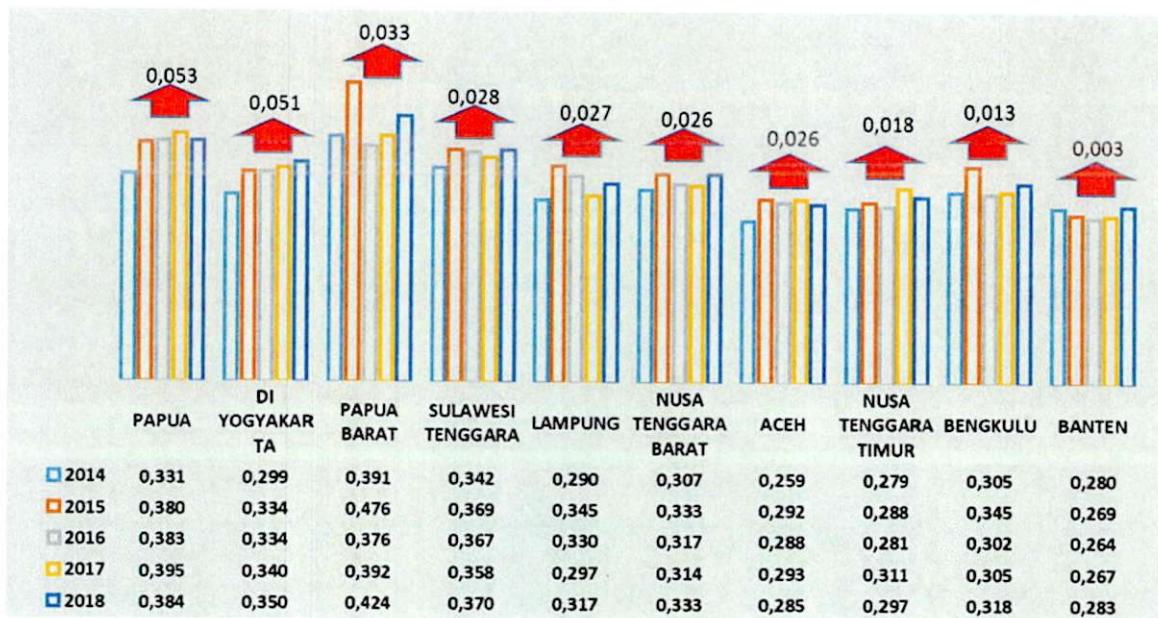
Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

**Gambar 4. Tren Memburuknya Indeks Keparahan Kemiskinan Pada Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

**Gambar 5. Grafik Provinsi Dengan Perkembangan Gini Rasio Terburuk**

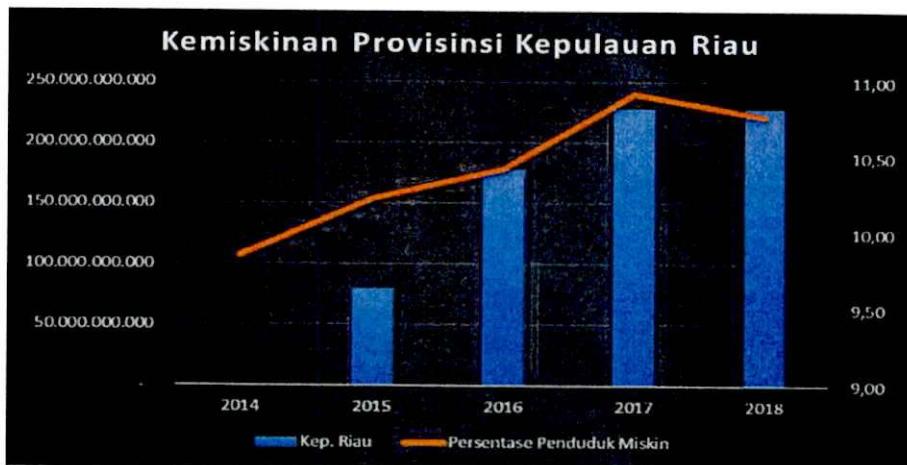


Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

Data diatas menunjukkan bahwa provinsi Kepulauan Riau seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah melalui kementerian terkait dalam hal pengawasan penggunaan Dana Desa

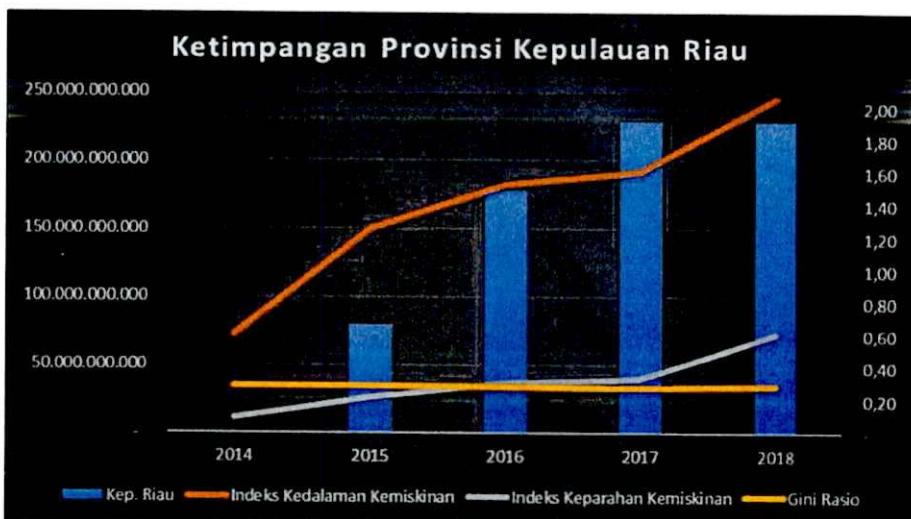
dikarenakan pada provinsi tersebut adanya Dana Desa sebagai tambahan pendapatan desa tidak memperbaiki malah memperburuk kemiskinan dan ketimpangan perdesaan dapat juga dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7 bahwa setelah adanya Dana Desa kemiskinan dan ketimpangan perdesaan di provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren kenaikan. Diperlukan adanya intervensi dari Pemerintah pusat dalam mengatasi tren kenaikan angka kemiskinan dan ketimpangan perdesaan di provinsi Kepulauan Riau.

**Gambar 6. Tren Kenaikan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber : SIMTRADA DJPK & Sumber : Badan Pusat Statistik (2018)

**Gambar 7. Tren Kenaikan Ketimpangan Provinsi Kepulauan Riau**



Sumber : SIMTRADA DJPK & Badan Pusat Statistik (2018)

#### IV. Rekomendasi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan

Beberapa catatan yang dapat diambil dalam mencermati capaian Dana Desa dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan perdesaan adalah bahwa besarnya dana yang

dialokasikan untuk Dana Desa belum sepenuhnya menunjukkan bahwa dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan perdesaan. Timpangnya proporsi penggunaan Dana Desa antara proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Kekurangan pendamping desa professional, proyek padat karya cash yang tidak tepat sasaran, dan penyimpangan pada penggunaan Dana Desa menjadi kemungkinan faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.

Berdasarkan data, Dana Desa mayoritas digunakan untuk proyek pembangunan daripada untuk proyek pemberdayaan masyarakat. Satgas Dana Desa sudah sepatutnya mengawasi hal ini dan memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan proporsi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat karena seharusnya bukan hanya fokus pada proyek pembangunan, tetapi juga seharusnya terdapat porsi yang proporsional untuk proyek pemberdayaan masyarakat desa.

Pengawasan dari seluruh pihak terkait dengan Dana Desa sangat diperlukan untuk mengawali penggunaan Dana Desa yang terencana dengan baik dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memberikan perhatian dalam pengawasan proyek padat karya cash agar lebih tepat sasaran untuk orang yang memang membutuhkan.

Pemenuhan kebutuhan pendamping desa professional menjadi hal yang diperlukan untuk perencanaan program yang baik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk segera memenuhi kekurangan tenaga pendamping desa professional.

Perlunya kerjasama dari Satgas Dana Desa dan aparat penegak hukum dalam mengawasi penggunaan Dana Desa agar kebocoran yang menjadi akibat dari penyelewengan tidak terus terjadi. Perlu adanya mekanisme pertanggungjawaban yang memadai untuk memastikan Dana Desa digunakan dengan benar dan tepat sasaran. Terus adanya penyelewengan Dana Desa merupakan gejala dari belum memadainya sistem pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, masih terdapat banyak celah pada sistem yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang memiliki wewenang terhadap penggunaan Dana Desa untuk menguntungkan diri sendiri.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Indeks Kedalaman, Keparahan Kemiskinan, dan Gini Rasio Perdesaan mengalami tren memburuk setiap tahunnya setelah adanya Dana Desa. Mengapa? Bagaimana peran pemerintah pusat dalam intervensi ke daerah mengenai hal ini?
2. Strategi pengawasan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mengawal proyek padat karya agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan ?
3. Kendala besar apa yang mendasari kurangnya pendamping desa pada saat ini ?
4. Bagaimana rencana intervensi pemerintah pusat untuk provinsi-provinsi yang memiliki performa buruk dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ?
5. Perlukah sistematika pengukuran outcome dari Dana Desa dalam satu tahun untuk dimasukkan dalam formulasi Dana Desa tahun berikutnya ?
6. Apakah dengan besarnya proporsi penggunaan Dana Desa kepada sektor pembangunan infrastruktur dirasa efektif dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan? Mengapa proporsi pemberdayaan masyarakat selisih sangat jauh dengan proyek pembangunan? Apakah fokus penggunaan Dana Desa hanya untuk proyek pembangunan ?
7. Mengapa tidak ada dashboard data untuk mengetahui kebutuhan dan pemenuhan pendamping desa pada web Kemendes PDTT ? Juga terdapat perbedaan data pada berita di web Kemendesa PDTT dengan di media perihal jumlah pendamping desa. Mengapa hal ini bisa terjadi ?

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2016. “Pendamping Desa”. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Julianto, Pramdia Arhando. 2017. Kemendes PDTT Akui Masih Kekurangan Pendamping Desa. Diakses pada:<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/28/163700026/kemendes-pdtt-akui-masih-kekurangan-pendamping-desa->. Diakses pada tanggal 6 September 2018.
- Kementerian Keuangan. 2017. “Buku Pintar Dana Desa : Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2017. Program Padar Karya Cash Solusi Penurunan Daya Beli. Diakses pada: <https://kemendesa.go.id/view/detil/2215/program-padat-karya-cash-solusi-penurunan-daya-beli> . Diakses pada tanggal 13 September 2018.
- Aryadji, H.S. 2017. Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. Diakses pada : <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/> . Diakses pada tanggal 13 September 2018.
- Indonesia Corruption Watch. 2017. Dana Desa Rentan Disalahgunakan. Diakses pada : <https://antikorupsi.org/id/news/dana-desa-rentan-disalahgunakan> . Diakses pada tanggal 13 September 2018.

**Dokumentasi presentasi analisis di Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu proses penyusunan analisis**



## **LAMPIRAN KEGIATAN 6**

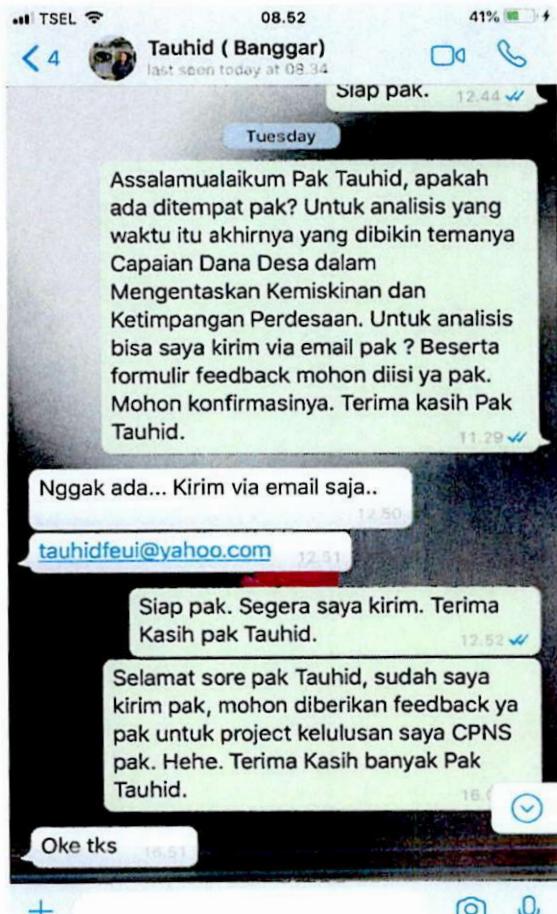
*Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan  
Anggaran dan Anggota / Tenaga Ahli badan  
Anggaran*

**6) Kegiatan 6 : Distribusi Analisis Kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	1. Izin dan konsultasi dengan Mentor 2. Pemberian analisis kepada Sekretaria Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran	ok <i>Amali</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	1. Badan Anggaran mendapatkan Analisis sesuai permintaan	ok <i>Amali</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	1. Etika Publik; 2. <i>Whole of Government</i> 3. Pelayanan Publik	ok <i>Amali</i>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	ok <i>Amali</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	ok <i>Amali</i>

**Catatan Tambahan:**

## Koordinasi pengiriman analisis dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran



## Pengiriman analisis kepada Tenaga Ahli Badan Anggaran via e-mail

Analisis Capaian Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Indonesia  

Achmad Yugo Pidhegsos <achmadyugo@gmail.com>

Fri, Sep 14, 10:53 AM



to freedca\_diketipratiti.

Selamat Pagi Bu Friska.

Tertarik dokumen analisis.

Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih

Hormat Saya,

Achmad Yugo Pidhegsos



Achmad Yugo Pidhegsos <achmadyugo@gmail.com>

Tue, Sep 25, 3:02 PM (5 days ago)



to tauhidfeul\_diketipratiti.

Kepada Pak Tauhid.

Saya lampirkan analisis tentang Capaian Dana Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan beserta formulir feedback. Mohon untuk dilihat ya pak.

Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih

Hormat Saya,

Achmad Yugo Pidhegsos

2 Attachments



## **LAMPIRAN KEGIATAN 7**

*Evaluasi Hasil Penyusunan Analisis*

7) Kegiatan 7 : Evaluasi Hasil Penyusunan Analisis

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan Mentor</li> <li>2. Pemberian lembar Evaluasi Output Analisis kepada Sekretariat Badan Anggaran dan Anggota/Tenaga Ahli Badan Anggaran</li> </ol>	ok Selalu
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKA Mendapatkan evaluasi terkait analisis yang disusun untuk Badan Anggaran</li> </ol>	ok Selalu
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Publik;</li> <li>2. <i>Whole of Government</i></li> <li>3. Pelayanan Publik</li> <li>4. Komitmen Mutu</li> </ol>	ok Selalu
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	ok Selalu
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	ok Selalu

**Catatan Tambahan:**



PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

**EVALUASI HASIL ANALISIS**

Judul Analisis : **Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Indonesia**

Nama : Tauhid Ahmad

Posisi/Jabatan  Anggota DPR RI  
 Tenaga Ahli  
 Sekretariat Badan Anggaran

Evaluasi :

1. Bagaimana kesesuaian tema analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?

Tema masih dibutuhkan mengingat dana desa merupakan salah satu komponen dalam belanja transfer daerah dan dana desa RAPBN

2. Bagaimana kesesuaian waktu pemberian analisis / referensi ?

Periode analisis masih relevan dengan data tahun terakhir 2018 namun belum ada informasi waktu pemberian analisis tersebut diberikan ke Badan Anggaran

3. Bagaimana kesesuaian substansi analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?

Masih perlu banyak penyempurnaan; (1) apakah dana desa telah memenuhi UU Desa tentang 10 % dari dan di luar dana transfer ke daerah tiap tahunnya ?; (2) apakah ada hubungan peningkatan dana desa dengan penurunan kemiskinan ?; (3) mengapa kemiskinan turun sementara kedalaman dan keparahan indeks gini semakin meningkat ? Tiga hal tersebut yang patut dijawab. Isu-isu lain bisa terkait implementasi di lapangan, seperti yang ada di bagian rekomendasi

4. Bagaimana kesesuaian jumlah halaman dan tampilan visual analisis / referensi terhadap kebutuhan Badan Anggaran ?

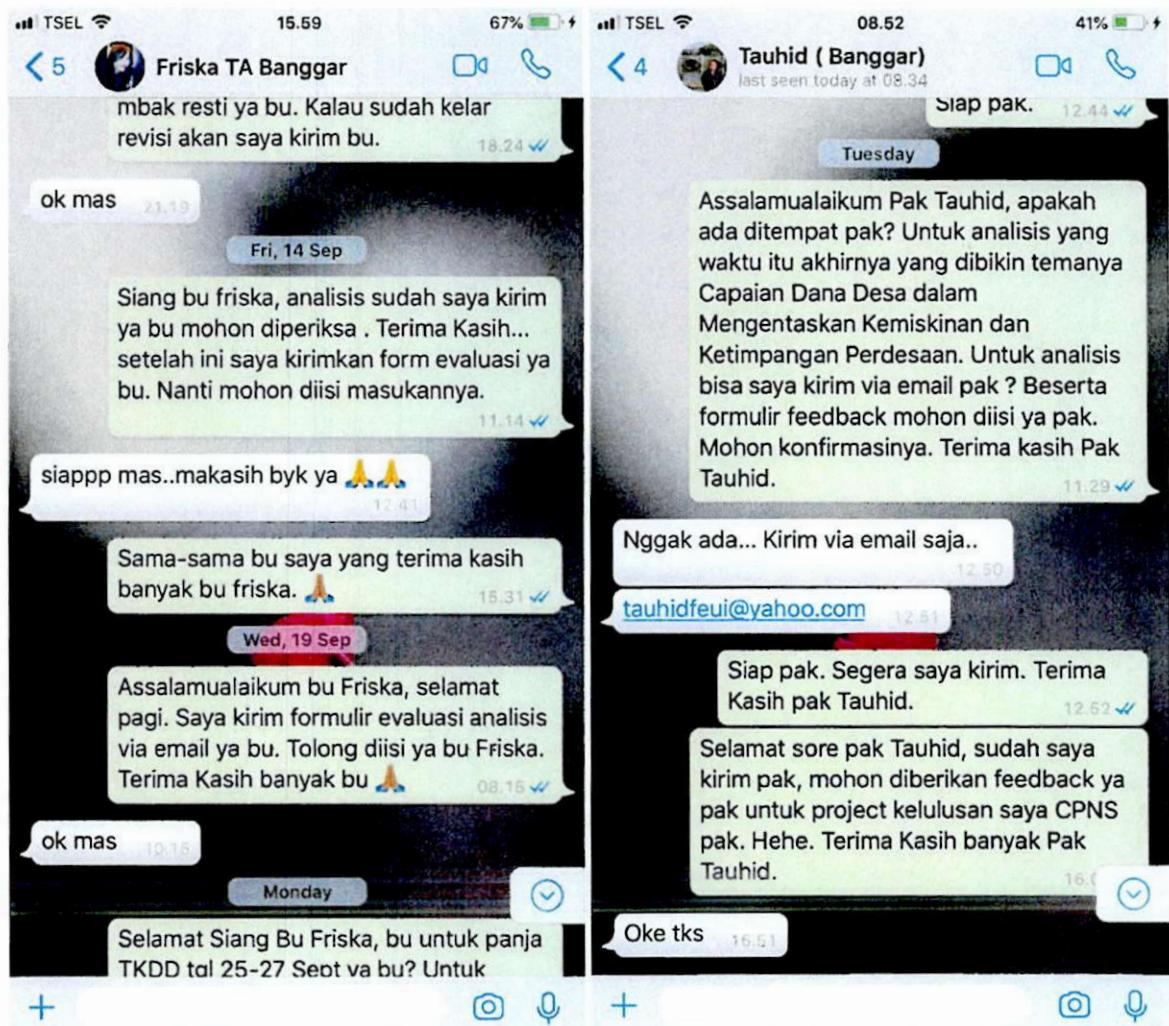
Tampilan visual antara satu gambar dan gambar lainnya tidak konsisten, termasuk penamaan judul gambar dan tabel. Sebagai referensi lihat laporan bank dunia triwulan untuk perekonomian Indonesia

5. Berikan saran agar penulisan analisis / referensi memenuhi kebutuhan Badan Anggaran.

- a. Pelajari dua komponen penting dana desa dan kemiskinan serta apa hubungan antara keduanya
- b. Coba pakai analisis lebih lanjut pakai ekonometrik atau setidaknya analisis gambar dua indikator dalam satu tabel (pivot)
- c. Ambil isu-isu yang menarik, baik analisis data sendiri maupun referensi dari pihak lain(Kemenkeu dll)
- d. Bagian analisis gambar 2-5 kurang terlalu relevan untuk ambil studi kasus, kalau analisis ketimpangan usahakan lebih makro lagi, misal antara Jawa dan Luar Jawa, Indonesia Barat dan Indonesia Timur dsb
- e. Upayakan ada studi lapangan untuk persoalan-persoalan teknis di lapangan tentang dana desa

**TERIMA KASIH**

**Koordinasi pengiriman formulir evaluasi hasil penyusunan analisis dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran via Whatsapp**



## Pengiriman formulir evaluasi hasil penyusunan analisis dengan Tenaga Ahli Badan Anggaran via e-mail

Analisis Capaian Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Indonesia

Achmad Yugo Pidhegsa <achmadyugo@gmail.com>  
to Freeda, direktorativ · Fri, Sep 14, 10:59 AM · 2 replies

Selamat Pagi Bu Friska.

Terlampir dokumen analisis.

Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Hormat Saya.

Achmad Yugo Pidhegsa



Formulir Evaluasi Analisis

Achmad Yugo Pidhegsa <achmadyugo@gmail.com>  
to Freeda, direktorativ · Wed, Sep 19, 8:17 AM (9 days ago) · 2 replies

Kepada Ibu Friska,

Terlampir formulir evaluasi analisis. Mohon dili untuk evaluasi hasil penulisan analisis.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapan Terima Kasih.

Hormat Saya.

Achmad Yugo Pidhegsa



## **LAMPIRAN KEGIATAN 8**

*Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan  
Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran*

**8) Kegiatan 8 : Pelaporan Hasil Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tanggal Konsultasi:</b>		
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin dan konsultasi dengan Mentor</li> <li>2. Evaluasi hasil penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> <li>3. Pembuatan Laporan hasil penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> <li>4. Pelaporan hasil penyusunan analisis berdasarkan hasil inventarisasi tema di Badan Anggaran</li> </ol>	<i>Ok</i> <i>slslsl</i>
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor menerima laporan hasil kegiatan Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran.</li> </ol>	<i>Ok</i> <i>slslsl</i>
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etika Publik;</li> <li>2. Komitmen Mutu</li> <li>3. Akuntabilitas</li> </ol>	<i>Ok</i> <i>slslsl</i>
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung visi misi PKA sebagai support fungsi Anggaran DPR RI</li> <li>• Mendukung fungsi PKA Pelaksanaan dukungan Anggaran</li> </ul>	<i>Ok</i> <i>slslsl</i>
Penguatan Nilai Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesionalitas</li> <li>• Akuntabilitas</li> <li>• Meningkatkan kualitas output PKA</li> </ul>	<i>Ok</i> <i>slslsl</i>

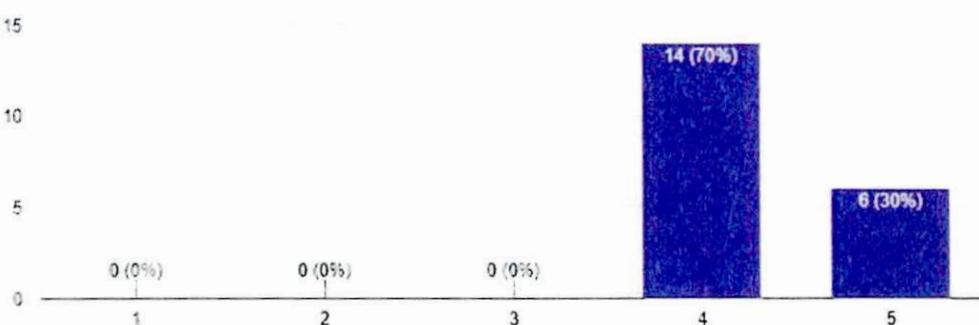
**Catatan Tambahan:**

## Hasil testimoni dari Pusat Kajian Anggaran (20 Responden)

### Pendapat anda terhadap Project Perubahan "Penyusunan Analisis Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tema di Badan Anggaran"

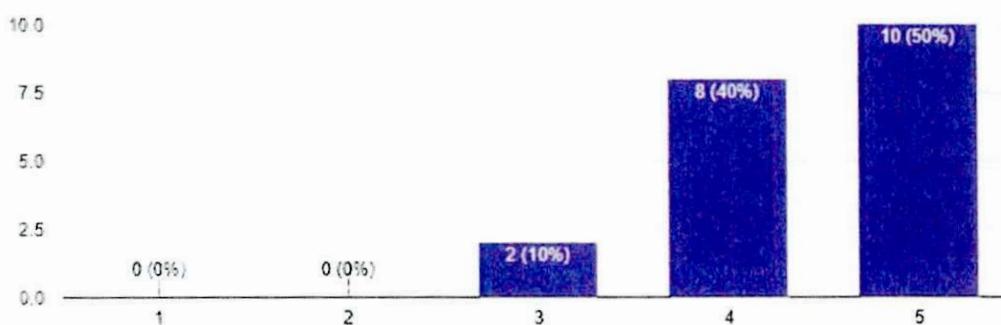
Pendapat anda tentang efektifitas pemilihan tema analisis melalui proses inventarisasi tema di Badan Anggaran

20 responses



Ketepatan terhadap pembahasan di Badan Anggaran dengan Tema Analisis yang dibuat

20 responses



## Berikan masukan tentang project perubahan ini

9 responses

Diperlukan analisis terhadap kendala dalam proses inventarisasi tema tersebut.

Sejatinya proyek perubahan ini sudah memiliki tujuan dan arahan yang sangat baik serta inovatif. Namun, dalam sebagian teknis pelaksanaan yang diusulkan dalam forum rapat mungkin sulit diimplementasikan, akan lebih baik jika ada modifikasi teknis dalam proses akomodasi tema selain mekanisme rapat tersebut.

Proyek perubahannya bagus namun perlu dipertimbangkan pula sosialisasi ke Badan Anggaran agar proyek ini lebih optimal

Baik, mengingat analisis yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan anggota sehingga tema yang dibuat sangat bermanfaat bagi anggota

Analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya (dalam hal ini: Banggar), memang perlu dilakukan. Agar PKA dan Banggar dapat lebih bersemangat kedepannya

Setuju untuk kedepannya akan lebih menarik jika tema analisis yg dibuat bisa disesuaikan dg isu2 yg sedang/akan dibahas oleh banggar agar output yg dihasilkan bisa tepat sasaran dan bermanfaat

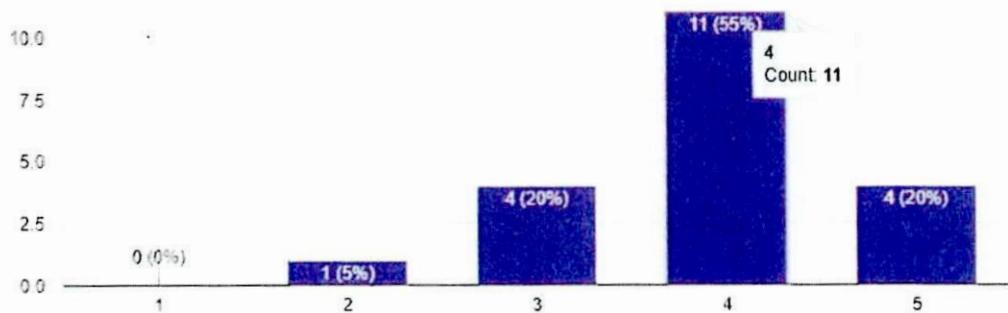
Proyek ini sangat baik karena kita sebagai analis anggaran jadi mempunyai arah isu apa aja yang akan kami kaji sesuai kebutuhan anggota, untuk masukan tidak ada

Tema diharapkan sesuai siklus APBN

## Pendapat anda terhadap layout atau format analisis dari project perubahan ini

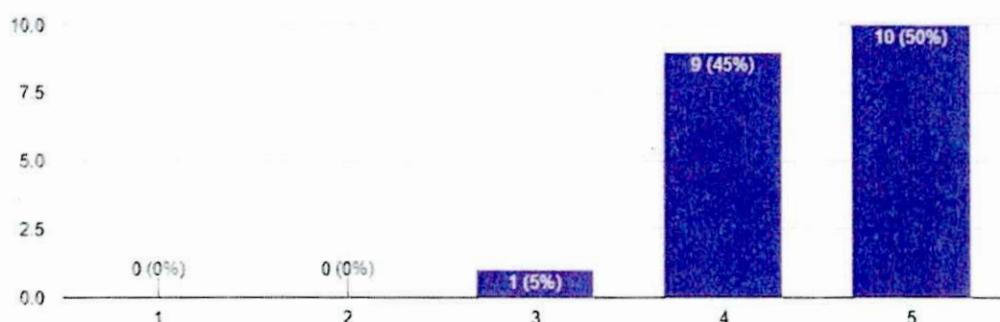
Jumlah halaman yang dibatasi hanya sampai 7 halaman isi

20 responses



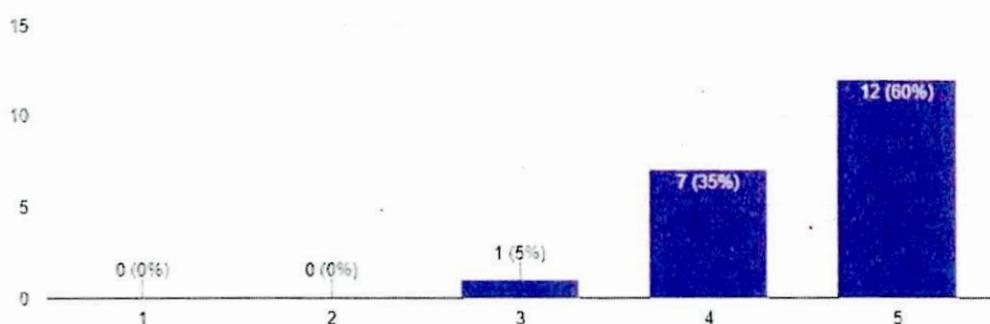
### Sub-judul langsung menjelaskan isu strategis

20 responses



### Menampilkan daftar pertanyaan pada akhir analisis

20 responses



### Berikan masukan tentang layout analisis dari project perubahan ini

7 responses

Kalau bisa jumlah halaman isi 5

Bisa berupa infografis

Jumlah Dana Desa pada tabel 1 alangkah lebih baik jika 1 kolom dengan jumlah diatasnya (tidak dimerger)

Secara format layout sudah sangat pas sepertinya untuk dilaksanakan seperti yang diinisiasi

Rekomendasi

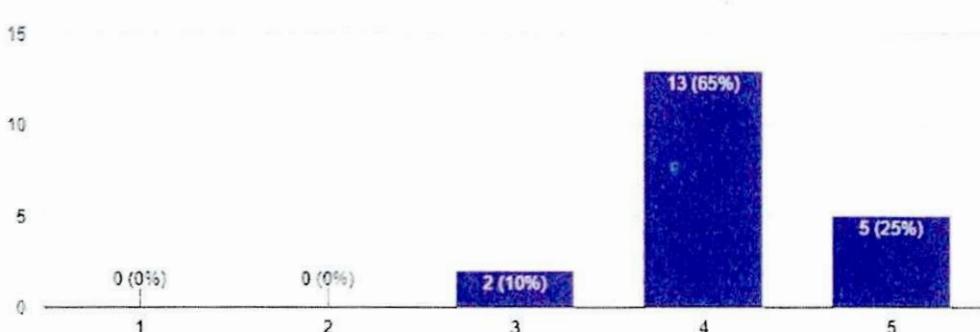
Terkait daftar pertanyaan Apakah ditujukan untuk pembahasan rapat banggar/ pertanyaan thdp substansi penulisan/pertanyaan saat presentasi analisis? Jika memang harus ditampilkan baiknya ditentukan min/max

Anggota dapat lebih antusias untuk menggunakan produk

## Pendapat terhadap kualitas Analisis dengan tema "Capaian Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Perdesaan Indonesia"

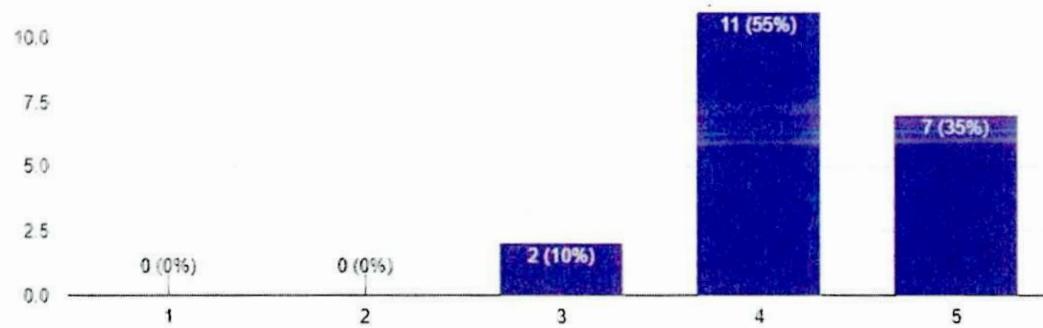
### Penyajian informasi dan data

20 responses



### Kualitas dari substansi analisis

20 responses



### Berikan masukan tentang kualitas analisis

1 responses

Analisis kurang mendalam.

Secara layout maupun format fisik saya rasa sudah sangat baik dan eye catching. Namun dalam perangkaihan tulisan antara sub bahasan serta benang merah substansi dalam satu batang tubuh tulisan masih bisa ditingkatkan lagi. Kesinambungan tulisan dari bagian awal hingga akhir perlu diperhatikan.

Ada baiknya informasi dana desa yang tidak efektif menggunakan daerah yang dana desanya meningkat namun ketimpangan masing tinggi, mengingat dana desa kepulauan riau yang dialokasikan sedang menurun.

Antara Informasi dan analisis substansi penulis harus seimbang